



WIRA

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN



Pemindahan Ibukota Baru Ke Kalimantan Timur dari Tinjauan Aspek Pertahanan Dan Keamanan

Aktualisasi Sistem Informasi Kesehatan yang Terintegrasi di Kemhan untuk Pertahanan Negara

ASEAN Center of Military Medicine (ACMM) sebagai Wadah Kerjasama Kesehatan Militer dalam mendukung Pertahanan Negara

EDISI 1/2022

ISSN 1693-0231



INDONESIA



www.kemhan.go.id



Kementerian Pertahanan Republik Indonesia



[kemhanri](https://www.instagram.com/kemhanri)



[@Kemhan_RI](https://twitter.com/Kemhan_RI)



[Kemhan RI](https://www.youtube.com/KemhanRI)



Sumber foto : void.id



Para pembaca WIRA yang budiman,

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin-Nya-lah di Tahun 2022 ini Majalah WIRA dapat kembali menyapa para pembaca di edisi ke-1 tahun 2022. Pada edisi ini redaksi menyajikan sejumlah artikel yang menarik dan informatif bagi para pembaca WIRA.

Informasi yang terkait dengan kegiatan pimpinan Kementerian Pertahanan kami rangkum dan sajikan dalam rubrik Fokus Pimpinan.

Dalam rubrik Artikel redaksi menyajikan tiga artikel dengan topik yang menarik yaitu Pemindahan Ibu Kota Negara ditinjau dari Aspek Pertahanan, Integrasi Kesehatan dengan Pertahanan Negara, Aktualisasi Sistem Informasi Kesehatan yang Terintegrasi di Kemhan untuk Pertahanan Negara serta ASEAN Center of Military Medicine (ACMM) sebagai Wadah Kerjasama Kesehatan Militer dalam mendukung Pertahanan Negara.

Sedangkan pada rubrik Fokus Lensa, redaksi menampilkan foto-foto kegiatan pimpinan Kemhan di lingkungan satuan kerja Kemhan.

Kami berharap semoga informasi dan artikel yang kami sajikan dalam Majalah WIRA edisi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta manfaat bagi para pembaca setia WIRA dimanapun berada dan bertugas.

Untuk memperkaya isi majalah WIRA, kami senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, kritik dan saran, melalui email redaksi.wira@kemhan.go.id. Majalah WIRA juga dapat diakses dalam jaringan online www.kemhan.go.id.

Selamat membaca.

Kepala Biro Humas,

Brigjen TNI Taufiq Shobri, M.Han

DEWAN REDAKSI

Pelindung/Penasihat: Sekjen Kemhan/Marsdya TNI Donny Ermawan T., M.D.S. - Penanggung Jawab: Karo Humas Setjen Kemhan/Brigjen TNI Taufiq Shobri - Redaktur: Kol. Sus Dr. Sulistyanto, S.Pd., M.Comm - Editor: M. Adi Wibowo, S.Sos, M.Si., - Desain Grafis: Imam Rosyadi- Fotografer: Acep Sutawijaya - Sekretariat: Kapten Cku Lindu Balianto/Mandiri Triadi, S.Sos, M.M - Diterbitkan oleh: Biro Humas Setjen Kemhan - Jl. Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta -Telp. 021-3829151, Fax. 3452457

Daftar Isi

Fokus Utama >>

Kemhan Gelar Forum Rapat Pimpinan Tahun 2022

6



Melalui Rapim Kemhan Tahun ini, diharapkan dapat meningkatkan kerja sama, kolaborasi, koordinasi dan sinergi untuk memastikan terlaksananya Program Kerja Tahun Anggaran 2022 secara baik dan efektif, serta meningkatkan fungsi pengawasan intern dengan melakukan pengawalan terhadap setiap perencanaan program kegiatan, agar Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI kepada Kemhan dapat dipertahankan.

Rapim UO Kemhan : Sekjen Kemhan Harapkan Kebijakan Pertahanan Negara Jadi Solusi Hadapi Ancaman

10

Fokus Pimpinan >>

Menhan Prabowo Dampingi Presiden Jokowi dalam Pertemuan dengan PM Singapura

12

Wamenhan Buka Rakor Penentu Kebijakan, Pengguna dan Produsen Bidang Alpalhankam

18

Kunjungi PT DI, Menhan Prabowo Dukung Pemasaran Pesawat CN235 ke Pasar Internasional

13

Wamenhan Herindra Tinjau Pembangunan Mercusuar di Perbatasan Indonesia dengan Malaysia, Singapura (14 Januari 2022)

19

Resmikan MRI Center RSPAD, Menhan Prabowo Tegaskan Dukungan untuk Peningkatan Bidang Kesehatan Tiga Matra TNI

14

Sekjen Kemhan Buka Rembuk Nasional Bela Negara

20

Menhan Prabowo Kunjungi UGM, Mahasiswa UGM Unjuk Gigi Inovasi Teknologi Pertahanan

15

Sekjen Harapkan Outcome dari Setiap Kegiatan Kemhan

21

Menhan Prabowo Terima Kunjungan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis

16

Artikel>>

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur dari Tinjauan Aspek Pertahanan dan Keamanan (Penulis: Kolonel Laut (P) Dr. Sugeng Suryanto, S.AP., M.A.P)

22



Aktualisasi Sistem Informasi Kesehatan yang Terintegrasi di Kemhan untuk Pertahanan Negara (Penulis drg. Pongki Sipahutar, Sp.KG)

30

ASEAN Center of Military Medicine (ACMM) sebagai Wadah Kerjasama Kesehatan Militer dalam Mendukung Pertahanan Negara (Penulis: Pembina IV/A Antonius Tri Novianto, S.T., M.M.)

37



46





KEMHAN GELAR FORUM RAPAT PIMPINAN TAHUN 2022

Oleh : Tim Redaksi

Kementerian Pertahanan (Kemhan) kembali menggelar Forum Rapat Pimpinan (Rapim) Tahun 2022. Perhelatan yang dimulai dari tanggal 19 sampai dengan 20 Januari di Kemhan, Jakarta dilakukan secara tatap muka dengan peserta terbatas dan melalui video conference yang dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Sejumlah pejabat menghadiri Rapim Kemhan yang mengangkat tema “Konsolidasi Pembangunan Kekuatan Pertahanan Negara”, diantaranya Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fajar Prasetyo, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan dari Kemenpolhukam Ses Menkopolhukam Mayjen TNI Mulyo Aji, M.A., serta Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Hilman Hadi.

Pada hari pertama, Rabu (19/1), Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M. Herindra berkesempatan untuk membuka Rapim Kemhan tahun 2022.

Dalam sambutan pembukaannya Wamenhan menyoroti tentang pentingnya kolaborasi dalam upaya memperbarui Kebijakan Pertahanan Negara. Diungkapkan Wamenhan, Kementerian Pertahanan terus berupaya memperbarui kebijakan pertahanan negara yang tepat sasaran, agar Sishankamrata dapat terlaksana dengan baik serta pertahanan dan keamanan Indonesia tetap tangguh dan maju.

“Melalui Rapim Kemhan Tahun ini, diharapkan dapat meningkatkan kerja sama, kolaborasi, koordinasi dan sinergi untuk memastikan terlaksananya Program Kerja Tahun Anggaran 2022 secara baik dan efektif, serta meningkatkan fungsi pengawasan intern dengan melakukan pengawalan terhadap setiap perencanaan program kegiatan, agar Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI kepada Kemhan dapat dipertahankan”, tegas Wamenhan M. Herindra.

Lebih lanjut dijelaskan Wamenhan, berdasarkan UUD 45, tugas Kemhan adalah menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan. Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Oleh

karenanya, penyelenggaraan pertahanan negara haruslah berpedoman pada Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang mengandalkan semua kekuatan komponen sumber daya yang kita miliki.

Hal ini selaras dengan posisi Kemhan sebagai satu-satunya entry point dari pengajuan seluruh keperluan penyelenggaraan pembangunan sistem pertahanan negara, dari Unit Organisasi Kemhan atau TNI dan exit point kepada Kementerian dan Lembaga dalam proses pemenuhannya.

Usai sambutan pembukaan dari Wamenhan, para peserta Rapim menyimak pemaparan dari Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana yang membahas Evaluasi Program Kemhan TA. 2021, yang dilanjutkan pemaparan Dirjen Renhan Kemhan Mayjen TNI Budi Prijono tentang Alokasi Anggaran Kemhan dan TNI Tahun Anggaran 2022.

Sedangkan perhelatan di hari kedua Kamis (20/1), Menhan Prabowo Subianto memimpin

langsung jalannya Rapim Kemhan Tahun 2022. Di hari kedua ini sejumlah 160 Perwira Tinggi TNI turut hadir, diantaranya Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, Kasau Marsekal TNI Fajar Prasetyo, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan pejabat dari Kementerian/Lembaga lainnya.

Saat memimpin Rapim Menhan mengungkapkan bahwa kebijakan pertahanan negara tahun 2022 merupakan hasil evaluasi dan tindak lanjut dari upaya pencapaian sasaran kebijakan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pertahanan negara tahun 2021.

Sasaran kebijakan yang masih berlangsung akan dilanjutkan, di antaranya kebijakan pembentukan komponen cadangan dan penataan komponen pendukung, kebijakan pembangunan postur TNI, perwujudan wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar, pembangunan sistem logistik yang terdesentralisasi dan penguatan



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

pertahanan di wilayah selat-selat strategis. “Melalui Rapim Kemhan ini diharapkan adanya sinergitas dan koordinasi yang lebih erat lagi demi kelancaran dan suksesnya tugas-tugas ke depan,” kata Menhan Prabowo.

Menhan Prabowo juga mengatakan bahwa kompleksnya dinamika lingkungan strategis saat ini berpotensi memunculkan berbagai bentuk ancaman seperti ancaman militer, nonmiliter hingga hibrida yang diprediksi masih akan mengancam kepentingan nasional, membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia di masa mendatang. “Ancaman militer bisa berbentuk ancaman militer kekuatan asing ataupun dalam negeri seperti konflik terbuka, perang konvensional, separatisme, dan ancaman operasi intelijen,” jelas Menhan.

Pelanggaran wilayah perbatasan darat, laut, maupun udara seperti pelanggaran oleh kapal-kapal asing bersenjata hingga pelanggaran wilayah udara oleh pesawat negara asing juga turut disebutkan Menhan Prabowo sebagai ancaman yang perlu diantisipasi oleh Indonesia.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang juga turut hadir pada hari kedua Rapim Kemhan, mengatakan dalam sambutannya Polri sangat mendukung penuh kebijakan konsolidasi kekuatan pertahanan negara, utamanya pengembangan sistem pertahanan negara yang sedang disusun dan menjadi roadmap pembangunan pertahanan negara 2020-2045 oleh Kemhan.

“Diperlukan sinergitas dan profesionalisme yang sangat kuat antara TNI dan Polri, bersama seluruh

komponen bangsa untuk selalu siap sehingga kita memiliki postur sistem pertahanan negara yang modern dan pengembangan kekuatan yang tangguh dalam menghadapi hakikat berbagai ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar,” tegas Kapolri.

Masih di hari kedua Rapim Kemhan, acara dilanjutkan dengan mendengarkan paparan Kebijakan Pertahanan Negara tahun 2022 oleh Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Rodon Pedrason dan disusul pemaparan Analisa Kontinjensi dalam Perspektif Pertahanan Negara dari Kabainstrahan Kemhan Mayjen TNI Yudi Abrimantyo serta paparan Rancangan Dokumen Strategis Pertahanan Negara oleh Warek I Unhan Mayjen TNI Jonni Mahroza.

Rangkaian acara Rapim Kemhan Tahun 2022 diakhiri dengan penyerahan dokumen strategis

pertahanan negara dari Menhan Prabowo kepada Pimpinan Unit Organisasi. Penyerahan dokumen strategis pertahanan negara diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kementerian Pertahanan dan TNI dalam menghadapi ancaman yang ditimbulkan dari dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Selain itu Menhan Prabowo juga menyerahkan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) secara simbolis dari Kementerian Pertahanan kepada Mabes TNI dan Mabes Angkatan yang diterima oleh Panglima TNI, Kasad, Kasal, dan Kasau.

Dipenghujung acara Rapim Kemhan tahun 2022, Menhan Prabowo juga secara resmi menetapkan dan memperkenalkan logo baru Kemhan RI untuk menggantikan logo Kemhan yang telah digunakan sejak tahun 2005.***



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

RAPIM UO KEMHAN

SEKJEN KEMHAN HARAPKAN KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA JADI SOLUSI HADAPI ANCAMAN



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebagai kementerian yang membidangi urusan pertahanan negara, harus memiliki kebijakan pertahanan negara dan langkah strategis yang tepat, dalam upaya penyelenggaraan pertahanan negara. Untuk itu, kebijakan pertahanan negara harus mampu dan menjadi solusi dalam menghadapi ancaman yang ditimbulkan dari dinamika perkembangan lingkungan strategis.

“Oleh karenanya, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pertahanan negara perlu adanya strategi yang berpedoman pada Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata),

yang mengandalkan seluruh kekuatan komponen sumber daya yang kita miliki, dalam penyelenggaraan pertahanan negara”, kata Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto saat membuka Rapat Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Pertahanan (Rapim UO Kemhan) Tahun 2022, di Kemhan, Jakarta, Rabu (16/2).

Di samping itu lanjut Sekjen Kemhan menyampaikan arahnya, komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar Satuan Kerja (Satker) dan Sub Satuan Kerja (Subsatker) UO Kemhan, serta segenap pemangku kepentingan juga perlu dibangun. Muara dari itu semua, tentu akan berdampak positif pada keberhasilan dan pencapaian efektifitas serta



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

efisiensi pelaksanaan tugas maupun fungsi satuan kerja, dengan tema “Konsolidasi Pembangunan Kekuatan Pertahanan Negara”, untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi serta kolaborasi dalam upaya pembangunan kekuatan pertahanan negara, dalam mewujudkan sistem pertahanan yang tangguh.

Rapim UO Kemhan 2022 merupakan forum penyampaian kebijakan pimpinan Tahun 2022, penyampaian atensi terhadap Kinerja UO Kemhan Tahun 2021 dan penyampaian program serta anggaran Kemhan Tahun 2022. Selain itu, pada Rapim UO Kemhan ini juga, mendengarkan penyampaian materi oleh Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana tentang Atensi Terhadap Kinerja UO Kemhan Tahun 2021, serta Karorenu Setjen Kemhan Brigjen TNI Sukabi tentang Program dan Anggaran Tahun 2022.

Di akhir acara, Sekjen Kemhan menyerahkan penghargaan kepada Tiga Satker yang meraih Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2021, yakni Biro Hubungan Masyarakat Setjen Kemhan, Direktorat Kesehatan Ditjen Kuathan Kemhan serta Pusat Bahasa Badan Pendidikan dan Latihan Kemhan.

Turut hadir pada Rapim UO Kemhan 2022 yang diselenggarakan secara virtual dan tatap muka, Pejabat Eselon I dan II Kemhan, Warek I Unhan, Ketua Bidang Litbang Standardisasi Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dan Kepala Pusat Cadangan Logistik Strategis (PCLS) serta perwakilan dari Mabes TNI dan Angkatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.***

MENHAN PRABOWO DAMPINGI PRESIDEN JOKOWI DALAM PERTEMUAN DENGAN PM SINGAPURA



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendampingi Presiden RI Joko Widodo dalam Leaders' Retreat Indonesia-Singapura dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (25/1).

Dalam pertemuan tersebut, beberapa nota kesepahaman di bidang politik, hukum dan pertahanan keamanan disepakati untuk menyempurnakan kedaulatan bangsa, yaitu perjanjian ekstradisi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat lintas batas negara seperti korupsi, narkoba, dan terorisme, persetujuan pengambilalihan Pelayanan Ruang Udara atau *Flight Information Region (FIR)* dari Singapura ke Indonesia yang telah diupayakan sejak tahun 1990-an, dan nota kesepahaman tentang komitmen untuk melaksanakan perjanjian kerja sama pertahanan antara kedua negara.

Pada kesempatan pertemuan tersebut Presiden RI Joko Widodo juga didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Sementara itu, dari delegasi Singapura hadir Menteri Senior dan Menteri Koordinator Keamanan Nasional Teo Chee Hean, Menteri Pertahanan Ng Eng Hen, Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum K. Shanmugam, Menteri Transportasi S. Iswaran, serta Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Tan See Leng.***

KUNJUNGI PT DI, MENHAN PRABOWO DUKUNG PEMASARAN PESAWAT CN235 KE PASAR INTERNASIONAL



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke PT Dirgantara Indonesia (PTDI), Rabu (2/2) menyatakan dukungan penuh pemerintah kepada PT. DI untuk memperluas pemasaran produk-produk PT. DI, terutama CN235 ke pasar internasional. Hal ini diutarakannya saat menyaksikan penandatanganan MoU tentang kerja sama penjualan dan pengembangan pesawat CN235 antara PT. DI dengan Jet Investment Group SARL, di Hanggar *Fixed Wing Final Assembly Line*, PT. DI, Bandung. “Saya dukung penuh kerja sama dalam rangka memasarkan produk-produk PT. DI terutama CN235 ke pasar internasional,” kata Menhan Prabowo.

Diungkapkan oleh Menhan Prabowo bahwa negara-negara lain telah menyatakan minat terhadap pesawat CN235, seperti Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin, dan beberapa negara Asia dan Eropa. Oleh karena itu, momentum ini harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh PT. DI. Menhan Prabowo juga mengatakan bahwa telah direncanakan pembelian 10 pesawat CN235 produksi PT. DI yang merupakan pesawat multirole oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, Menhan Prabowo berharap PT. DI dapat meningkatkan kapasitas produksinya dari yang

saat ini empat unit pesawat CN235 per tahun agar dapat meningkat menjadi 24 unit pada tiga tahun mendatang secara berkala untuk memenuhi permintaan dari dalam negeri dan luar negeri.

Adapun untuk meningkatkan kapasitas industri pertahanan dalam negeri, Kementerian Pertahanan senantiasa mendukung dengan memaksimalkan kesepakatan *Transfer of Technology (ToT)* dan offset dari negara lain. “Kita boleh beli sebagian ke mitra luar negeri, tetapi syaratnya ada ToT dan offset. Dia harus membantu mengembangkan PT. DI. Dia harus investasi di sini,” kata Menhan Prabowo. Penandatanganan MoU antara PTDI dan Jet Investment Group SARL dilaksanakan oleh Direktur Utama PT. DI Marsda TNI Gita Amperiawan dan CEO Jet Investment Group SARL Yves-Michel Deloche, disaksikan seluruh jajaran direksi serta Komisariss PTDI.

Menhan Prabowo mengatakan bahwa kerja sama ini diharapkan dapat menjadi langkah awal memperluas pemasaran produk-produk PT. DI, terutama CN235 ke pasar internasional. “Kita ingin mengembalikan PT. DI pada tingkat yang pernah dicapai dan kembali menjadi kebanggaan bangsa sebagai bukti kebangkitan Indonesia,” tegas Menhan Prabowo.

Kepada para direksi PTDI Menhan Prabowo pun berpesan agar senantiasa menjalankan manajemen dengan sebaik-baiknya. “Kalau industri kita tidak kuat tidak mungkin ekonomi kita kuat. Dan kalau ekonomi kita tidak kuat tidak mungkin kita bisa jaga kedaulatan bangsa Indonesia,” kata Menhan Prabowo.

Dirut PTDI pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa PTDI hendak memperluas pasar penjualan pesawat CN235 secara internasional.

Adapun basic configuration pesawat CN235 ke depan akan menggunakan *mission and avionic system* terbaru sebagaimana terpasang pada pesawat N70 TNI AL.

“Dalam hal ini, PTDI dan Jet Investment Group juga akan mengembangkan pesawat CN235 tersebut dengan konfigurasi *Fire Fighting* dan *Medical Evacuation*, berikut dengan penguatan layanan purna jualnya,” ujar Dirut PTDI.***

RESMIKAN MRI CENTER RSPAD, MENHAN PRABOWO TEGASKAN DUKUNGAN UNTUK PENINGKATAN BIDANG KESEHATAN TIGA MATRA TNI

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Kamis (3/2) menegaskan dukungan Kementerian Pertahanan untuk peningkatan kemampuan bidang kesehatan tiga matra TNI. Hal ini disampaikan oleh Menhan Prabowo saat meresmikan fasilitas kesehatan baru di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, yaitu *Magnetic Resonance Imaging (MRI) Center*.

Menhan Prabowo mengatakan dukungan pemerintah untuk peningkatan kemampuan bidang kesehatan tiga matra TNI antara lain adalah dengan menambah rumah sakit di komando-komando utama dan meningkatkan fasilitas di rumah sakit TNI yang telah ada guna menunjang penyediaan layanan kesehatan terbaik bagi prajurit TNI maupun masyarakat umum. “Dalam peperangan yang akan datang, ancaman yang besar bagi negara kita akan semakin berbentuk lain, di antaranya adalah ancaman biologi. Karena itu, datangnya pandemi saat ini adalah alarm bagi kita agar kita lebih fokus, lebih memperhatikan masalah medis,” ujar Menhan Prabowo.

Ia melanjutkan bahwa bagi prajurit pun kemampuan bidang kesehatan merupakan dukungan yang sangat penting. “Jawatan kesehatan, dinas kesehatan merupakan dukungan yang sangat vital

bagi keberhasilan sebuah angkatan perang. Adanya dinas kesehatan, adanya pelayanan kesehatan yang handal itu adalah moril bagi prajurit di semua garis. Baik darat, laut, dan udara.

Menhan Prabowo dalam kesempatan tersebut juga mengapresiasi para tenaga kesehatan yang telah berjuang di garis terdepan dalam menghadapi pandemi COVID-19, dan mengimbau agar seluruh personel di rumah sakit senantiasa menjaga dan merawat fasilitas yang telah ada. “Tentu saya ingatkan ini adalah hasil rakyat, uang rakyat. Harus kita jaga dengan baik. Jaga aset-aset yang hebat ini,” ujar Menhan Prabowo.

Kepala RSPAD Letjen TNI dr. A. Budi Sulistyia, Sp.THT-KL., M.A.R.S., dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa adanya MRI Center ini akan semakin melengkapi dan meningkatkan pelayanan di RSPAD Gatot Subroto. Saat ini, RSPAD adalah RS yang memiliki MRI terbanyak di Asia Tenggara dengan total lima unit MRI. “Ini merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat Indonesia, bagi TNI, dan TNI Angkatan Darat,” ujarnya. Turut mendampingi Menhan pada peresmian ini Kapuskes TNI yang mewakili Panglima TNI dan Wakasad mewakili Kasad.***

MENHAN PRABOWO KUNJUNGI UGM, MAHASISWA UGM UNJUK GIGI INOVASI TEKNOLOGI PERTAHANAN



Dalam kunjungan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Jumat (4/2), civitas academica UGM menampilkan beberapa inovasi pengembangan teknologi dalam bidang pertahanan yang telah berhasil dibuat. Beberapa inovasi di bidang pertahanan yang ditampilkan oleh UGM di antaranya adalah pesawat tanpa awak atau UAV Fiachra Aeromapper, UAV Amphibi Gama V2, *Rudal Pasopati Rocket Assisted Take-Off*, Drone Palapa S-1, dan *Geospatial Artificial Intelligence (GEOAI)* untuk bidang pertahanan dan keamanan.

Azhar Aulia Rasidin (22), mahasiswa Teknik Mesin UGM angkatan 2017 yang ikut mengembangkan Drone Palapa S-1 mengatakan bahwa pesawat nirawak itu berfungsi untuk pemantauan (*surveillance*). Drone yang memiliki daya jelajah sekitar 500 kilometer dalam waktu enam jam dan dapat mencapai ketinggian 1 kilometer ini dikembangkan sejak 2021 oleh Tim Force UGM. "Itu untuk pemantauan wilayah misal kebakaran hutan. Kelebihannya yang paling menonjol dari drone ini adalah kemampuan take off langsung vertikal. Jadi bisa langsung mencapai ketinggian yang kita mau terus langsung bergerak maju. Langsung dari sana," kata Azhar. "Kalau untuk pertahanan mungkin bisa di daerah perbatasan, untuk memantau daerah perbatasan kalau misalnya ada sesuatu yang mencurigakan bisa segera di laporkan," lanjutnya.

Sementara itu, Ditya Farhaz (21) mahasiswa Fakultas Teknik Mesin UGM angkatan 2019 yang ikut mengembangkan Rudal Pasopati mengatakan bahwa rudal ini mampu menargetkan sasaran rendah dan tidak terdeteksi oleh radar. "Sebagai penarget sasaran diam untuk ketinggian rendah agar tidak terdeteksi oleh radar," kata Ditya. Ia menjelaskan rudal ini telah diriset oleh mahasiswa UGM sejak 2016-2017 dengan hasil dapat ditempuh jarak terbang sekitar 5 kilometer dengan maksimal speed 130 kilometer per jam dengan ketinggian 100 meter.

Menhan Prabowo dalam kesempatan tersebut mengapresiasi inovasi teknologi pertahanan dari UGM. Untuk itu, telah ditandatangani kerja sama antara Kemhan dan UGM tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan teknologi yang mendukung pertahanan negara. "Kemhan akan bekerja sama dengan erat dengan UGM. Sama dengan kerja sama kami dengan universitas lainnya. Kita sangat butuh hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karya dari para ilmuwan kita. Para ilmuwan kita sangat menentukan dalam pengembangan teknologi untuk bangsa Indonesia," kata Menhan Prabowo.

"Untuk itu saya datang ke kampus dan bicara dengan para Guru Besar untuk cari di mana kita bisa kerja sama. Di mana bisa kita bantu dan sinergikan kemampuan-kemampuan yang ada di kampus-kampus. Kita bantu dan kita dorong sehingga mereka lebih produktif dan inovatif," lanjutnya.***

MENHAN PRABOWO TERIMA KUNJUNGAN MENTERI ANGKATAN BERSENJATA PRANCIS



Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis H.E. Mrs. Florence Parly beserta delegasi di Kemhan, Jakarta, Kamis (10/2). Selain bertemu Menhan RI, Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis juga melaksanakan kunjungan kehormatan ke Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

Dalam pertemuan bilateral di Kemhan, kedua delegasi membahas peningkatan kerjasama pertahanan antara kedua Negara, yang diharapkan dapat memperkuat hubungan pertahanan bilateral antara Indonesia dan Prancis di masa mendatang. “Kami membahas secara mendalam beberapa hal, sebagaimana diketahui Indonesia dan Prancis telah menjalin kerjasama pertahanan cukup lama sejak 1950. Dan saat ini, status hubungan bilateral kita dibidang pertahanan berada dalam status tertinggi,

yaitu kita telah menandatangani Persetujuan Kerja sama Pertahanan / *Defence Cooperation Agreement (DCA)* pada 28 Juni 2021. Tentunya ini butuh ratifikasi dari parlemen kita untuk bisa dilaksanakan dengan baik,” ujar Menhan Prabowo.

Kementerian Pertahanan RI menyambut baik rencana pengembangan mekanisme kerjasama 2+2 antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan kedua negara guna peningkatan kerjasama kerjasama bilateral. Indonesia dan Prancis telah menjalin kerja sama pertahanan yang kuat, khususnya di bidang alutsista. Kerja sama pertahanan di bidang pendidikan dan pelatihan antara lain kegiatan program pertukaran kunjungan dan rencana kunjungan marinir Indonesia ke Kaledonia Baru. Selain itu lebih dari 300 personel militer Indonesia telah menyelesaikan program pendidikan dan pelatihan di Prancis. Program pendidikan yang dilaksanakan di Prancis pada tahun 2021 adalah pendidikan setingkat Seskoad dan Sekolah Spesialisasi AL.



Pertemuan bilateral antara Kemhan RI dan Delegasi Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis ini diakhiri dengan penandatanganan beberapa Perjanjian kerjasama yang disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan kedua negara. Perjanjian kerjasama tersebut antara lain: kontrak pembelian 6 pesawat tempur Rafale antara Kabaranaan Kemhan dengan *Dassault Aviation*, sebagai awal dari kontrak yang lebih besar untuk 36 pesawat tempur Rafale berikutnya, MoU kerjasama di bidang research and development kapal selam antara PT PAL dengan Naval Grup, MoU kerjasama Program Offset dan ToT antara *Dassault Aviation* dan PT DI, MoU kerjasama di bidang telekomunikasi antara PT LEN dan Thales Group, dan kerjasama pembuatan munisi kaliber besar antara PT Pindad dan Nexter Munition.

Sementara itu Menteri Angkatan Bersenjata Prancis H.E. Mrs Florence Parly mengatakan kunjungannya ini menjadi kesempatan untuk berbicara dengan Menhan Prabowo Subianto tentang berbagai program alutsista yang ingin dikembangkan Indonesia dengan dukungan Prancis dan Industri Pertahanan Prancis yang profesionalisme dan kualitasnya diakui di seluruh dunia. Prancis bertekad mendukung secara aktif program-program strategis besar Indonesia dan mendukung pengembangan industri pertahanan Indonesia yang solid. "Indonesia yang menjatuhkan pilhan

untuk menggunakan Pesawat Rafale menunjukkan kepercayaan Indonesia kepada Prancis dan menjadi bukti bahwa kemitraan strategis kedua negara sangat kuat dan dinamis. Penandatanganan kontrak antara Indonesia dan Prancis yang baru saja dilaksanakan ini merupakan tahap penting dalam proses pengadaan alutsista Indonesia, dan Prancis berharap kontrak kerjasama ini dapat diaktifkan sesegera mungkin," ujar Menteri Parly.

Pada kunjungan kehormatan ini, Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis didampingi Duta Besar Prancis untuk Indonesia Mr Olivier Chambard, Kepala Kabinet Militer Perancis Mr. Fabian Mandon, Kasubdit Operasional Hubungan Internasional Mr. Arnaud Gaviard, Konselor Diplomatik Mr. Florian Escudie, Konselor Urusan Kerjasama Industri Mr. Simon Desindes. Sementara itu Menhan Prabowo didampingi oleh Wamenhan RI M. Herindra, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana, Rektor Unhan Laksdya TNI Octavian Amarula, Asisten Khusus Menhan di Bidang Manajemen Hanneg Letjen (Purn) Sjafrie Syamsudin, Asisten Khusus Menhan Bidang Lingstra Letjen (Purn) Hotma M. Pandjaitan, Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Rodon Pedrason, dan Kabaranaan Kemhan Marsda TNI Yusuf Jauhari. ***

WAMENHAN BUKA RAKOR PENENTU KEBIJAKAN, PENGGUNA DAN PRODUSEN BIDANG ALPALHANKAM



Hal terpenting dalam ekosistem industri pertahanan (indhan) adalah tata kelola manajemen perusahaan yang baik dan benar. Selain itu, sederhana, transparan serta akuntabel merupakan prinsip-prinsip yang harus dijalankan setiap pemangku kepentingan. Demikian dikatakan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M. Herindra saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penentu Kebijakan, Pengguna dan Produsen Bidang Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) di Jakarta, Rabu (12/1), dengan tema “Optimalisasi Kemampuan Industri Pertahanan Dalam Mendukung Kesiapan TNI, Polri dan Kementerian dan Lembaga Terkait serta Mewujudkan Kemandirian Industri Pertahanan Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Nasional Menuju Indonesia Tangguh”.

“Lima hal yang perlu menjadi atensi dalam perkembangan industri pertahanan diantaranya, ciptakan ekosistem industri pertahanan, bangun kemandirian serta tingkatkan daya saing, ciptakan solusi cerdas di berbagai bidang, lakukan reformasi global supply chain dan perkuat kerja sama strategis, serta ubah pola pikir dari semula hanya fokus kepada produk menjadi fokus pada pasar terlebih dahulu”, kata Wamenhan.

Usai membuka Rakor yang diselenggarakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, Wamenhan

didampingi Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., bersama sejumlah pejabat Kemhan, berkesempatan meninjau pameran indhan dalam negeri dari 28 industri pertahanan dengan 30 stand pameran, diantaranya PT. Len Industri, PT. PAL Indonesia, PT. Dirgantara Indonesia, PT. Dahana dan PT. Pindad.

Rakor Penentu Kebijakan, Pengguna dan Produsen Bidang Alpalhankam tersebut, juga menghadirkan sejumlah pembicara diantaranya, Dirjen Pothan Kemhan Mayjen TNI Dadang Hendrayudha yang menyampaikan materi tentang “Ekosistem Indhan dan Cipta Kerja”; Waasrenum Panglima TNI Marsma TNI Wayan Superman dengan materi “Pemenuhan Alutsista TNI oleh Industri Pertahanan”; Karo Jakstra Srena Kapolri Brigjen Pol. Kasmudi, S.I.K. tentang “Pemenuhan Almatsus Polri oleh Industri Pertahanan”; dan Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) Kemenperin, Nila Kumalasari yang menyampaikan materi tentang “Peningkatan Penggunaan Produk Alpalhankam Dalam Negeri Guna Meningkatkan Perekonomian Nasional”.

Selain Kemhan, peserta yang mengikuti Rakor tersebut sebanyak 260 orang terdiri dari perwakilan sejumlah Kementerian dan Lembaga, TNI, Polri, dan Indhan ini, dimaksudkan untuk mempromosikan produk Alpalhankam indhan dalam negeri kepada pengguna dan membangun ekosistem serta silaturahmi stakeholder dengan indhan, yang bertujuan mewujudkan kemandirian indhan dalam pemenuhan Alpalhankam.***

WAMENHAN HERINDRA TINJAU PEMBANGUNAN MERCUSUAR DI PERBATASAN INDONESIA DENGAN MALAYSIA, SINGAPURA



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Wakil Menteri Pertahanan M Herindra pada Kamis (13/1) meninjau pembangunan mercusuar dengan struktur permanen dan helipad di Karang Singa di perairan utara Pulau Bintang, Provinsi Kepulauan Riau, Batam yang merupakan daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura.

Pembangunan mercusuar dan helipad ini dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dan akan dilanjutkan oleh Kementerian Perhubungan. Adanya mercusuar dengan struktur permanen ini adalah untuk menjadi titik penanda kedaulatan Indonesia. “Kita tidak ingin kejadian sengketa antara Indonesia dan Malaysia terkait perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan yang akhirnya dimenangkan Malaysia di Mahkamah Internasional pada 2002 terulang,” ujar Wamenhan Herindra.

Pulau Karang Singa terletak di Selat Malaka, salah satu yang jalur lalu lintas laut terpadat di dunia sehingga

harus dijaga dan diberi tanda bahwa itu merupakan wilayah NKRI. Di perbatasan internasional ini, negara Singapura telah menguasai teritorial Batu Putih (Pedra Branca). Sedangkan negara Malaysia sudah menguasai Karang Tengah (Middle Rock). “Tak boleh ada lagi sejenkal tanah yang boleh diambil oleh negara lain, kita harus tunjukkan kedaulatan kita” ucap Wamenhan.

Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia. Pada kesempatan tersebut Mendagri Tito mengatakan poin penting pembangunan mercusuar ini adalah mengimbangi infrastruktur yang telah dibangun pemerintah Malaysia yang telah membangun struktur permanen dan helipad di wilayah Middle Rock. Sedangkan di Pulau Karang Singa hanya ada pelampung yang ukurannya kecil. “Poin pentingnya adalah jangan jomplang. Di Malaysia mereka sudah membangun struktur permanen, sementara wilayah kita itu hanya ada ‘buoy’ saja. Belum permanen,” ungkap Wamenhan.***

SEKJEN KEMHAN BUKA REMBUK NASIONAL BELA NEGARA

Sekretaris Jenderal Kementerian (Sekjen Kemhan) Marsekal Madya TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., membuka Rembuk Nasional Bela Negara Tahun 2022 yang bertemakan “Optimalisasi Peran Kementerian dan Lembaga, TNI, Polri, Pemda, dan Komponen Bangsa dalam Menstandarisasikan Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara” di Jakarta, Selasa (25/1).

Acara Rembuk Nasional Bela Negara yang diselenggarakan oleh Direktorat Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan, diikuti oleh Guru Besar Ilmu Politik Unhan RI Prof Salim Haji Said, Ph.D., Perwakilan dari Pejabat Bappenas, Kemendagri, Kemdikbud Ristek, Kemen PAN RB, Pejabat Kementerian dan Lembaga RI, Pejabat Kemhan, Mabes TNI, Mabes Angkatan, Polri, dan Direksi Perusahaan BUMN atau Swasta serta Peserta Rembuk Nasional Bela Negara Tahun 2022.

“Kegiatan Rembuk Nasional Bela Negara Tahun 2022 sangat penting dan strategis, disamping sebagai ajang silaturahmi antar pejabat Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, TNI serta Polri, juga sebagai wahana membangun sinergi dalam melaksanakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN)”, kata Sekjen Kemhan dalam sambutannya.

Selain itu, Bela Negara diyakini sebagai salah satu strategi dalam penyelenggaraan pertahanan negara, dimana seluruh komponen bangsa bersatu, menyamakan visi misi dalam usaha menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa dan negara. Sejarah telah membuktikan bahwa negara Indonesia dibentuk oleh seluruh komponen bangsa. Pembentukan ini



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

berawal dari pengorbanan yang dilakukan berpuluh-puluh tahun lalu dengan Semangat Bela Negara.

Lebih lanjut Sekjen Kemhan menyampaikan, bahwa Bela Negara bukan hanya menjadi tugas dan kewajiban Kemhan, TNI dan Polri semata, tetapi Bela Negara merupakan tugas dan kewajiban Warga Negara Indonesia sebagai bagian dari komponen bangsa.

Rembuk Nasional Bela Negara yang diselenggarakan selama dua hari dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, juga diisi dengan penyampaian materi oleh Dirjen Pothan Kemhan Mayjen TNI Dadang Hendrayudha tentang “PKBN di Lingkup Pendidikan, Pemukiman, dan Pekerjaan”. Selain itu, sejumlah pembicara juga menyampaikan materi dari perwakilan Kementerian dan Lembaga diantaranya dari Bappenas, Kemendagri, Kemdikbud, Kemen PAN RB, dan Kemendikbud Ristek. Rangkaian acara Rembuk Nasional Bela Negara yang dilaksanakan secara online dan offline, juga diisi dengan “Ngopi Daring Bela Negara” dengan menghadirkan beberapa tokoh antara lain Guru Besar Ilmu Politik Unhan RI Prof Salim Haji Said, Ph.D., Aktor Film Ario Bayu, dan influencer Cania Citta.***

SEKJEN HARAPKAN OUTCOME DARI SETIAP KEGIATAN KEMHAN



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Capaian kinerja harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Disamping itu, Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan organisasi, serta dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN RB.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen Kemhan Marsekal Madya TNI Donny Ermawan Taufanto saat membuka sekaligus mendengarkan penyampaian Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 Satuan Kerja Unit Organisasi Kementerian Pertahanan (Satker UO Kemhan), yang juga dihadiri Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana dan Rektor Unhan RI Laksdya TNI Prof. Dr. Octavian Amarula, S.T., M.Sc., DESD., di Gedung Urip Sumohardjo, Kemhan, Jakarta, Senin (24/1).

Dalam kegiatan ini, seluruh Satker menyampaikan capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 berdasarkan program kegiatan dan anggaran, yang telah dialokasikan kepada Sekjen Kemhan.

Menurut Sekjen Kemhan saat memimpin kegiatan, capaian kinerja satker akan digunakan sebagai bahan masukan bagi Satker untuk lebih meningkatkan kinerjanya, sehingga Kemhan dapat memiliki tujuan dan sasaran yang jelas serta berorientasi pada hasil atau outcome (*result oriented government*). "Jangan hanya fokus pada keluaran (*output*) dari setiap kegiatan, tetapi hasil (*outcome*) dari setiap program", ujar Sekjen Kemhan.

Usai penyampaian Capaian Kinerja Satker Kemhan, acara dirangkai dengan Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022, oleh Kepala Satker Eselon I dan Eselon II kepada Sekjen Kemhan. "Ini merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)", tegas Sekjen Kemhan. Kegiatan Penyampaian Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 Satker UO Kemhan dengan menerapkan protokol kesehatan, dilaksanakan secara offline maupun online yang diikuti oleh Pejabat Eselon I, II, dan III Kemhan.***

PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA KE KALIMANTAN TIMUR DARI TINJAUAN ASPEK PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Oleh: Kolonel Laut (P) Dr. Sugeng Suryanto, S.AP., M.A.P

Kepala Sub Direktorat Penyusunan Kebijakan Pengembangan Pertahanan Negara,
Ditjakstrahan Ditjen Strahan Kemhan RI

Ibu kota dalam suatu negara memegang peranan yang sangat vital dan strategis, sehingga dari aspek pertahanan dan keamanan menjadikan wilayah Ibu Kota Negara dianggap sebagai *Center of Gravity* (CoG). Menurut Dr. Connie Rahakundini Bakrie dalam Seminar Pusat Kekuatan Strategik (*Strategic Center of Gravity*) Tentara Nasional Indonesia yang diadakan oleh Pusat Kajian Strategi MABES TNI, CoG bisa jadi mirip dengan kapabilitas karakteristik dari sebuah Negara. Kapabilitas tersebut terdiri atas kebebasan bertindak (*freedom of action*), kemampuan fisik (*physical strength*), dan kehendak untuk melawan (*will to fight*). Kapabilitas karakteristik

ini pun terkait dengan beberapa aspek, antara lain kapabilitas kritis atau *critical capability* yang secara inheren merupakan sebuah kemampuan dimana CoG dapat berfungsi suatu negara tersebut.

Kebanyakan negara memiliki Ibu Kota Negara yang multifungsi yaitu sebagai pusat politik dan pusat pemerintahan, pusat kegiatan bisnis dan ekonomi, serta pusat semua yang mencirikan karakter dan keragaman secara menyeluruh dari sebuah negara. Ibu Kota Negara juga merefleksikan keunikan karakter suatu bangsa, seperti keberagaman suku bangsa, agama, kebudayaan, dan haluan politik. Dalam perspektif hubungan internasional,

Ibu Kota Negara juga menjadi gerbang utama dari suatu negara tempat kedudukan perwakilan diplomatik negara lain dan organisasi internasional, serta menjadi miniatur suatu negara.

Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak Kota Metropolitan di dunia. Peran yang dimiliki Jakarta dalam dinamika yang terjadi di Indonesia sangat sentral. Selain Jakarta berfungsi sebagai pusat pemerintahan juga merupakan pusat ekonomi, bisnis, politik, dan kebudayaan di Indonesia. Hal inilah yang menjadikan Jakarta sebagai magnet migrasi dan urbanisasi yang luar biasa dari seluruh penjuru nusantara yang mengakibatkan Jakarta menjadi kota terpadat di Indonesia, serta menimbulkan permasalahan yang sistemik pada aspek-aspek lain seperti degradasi lingkungan, kemacetan, kejahatan dan tindak kriminal. Bahkan korupsi yang merajalela di ranah pemerintahan juga diduga akibat status Jakarta yang menjadi pusat perekonomian.

Posisi geografi Jakarta yang berada di bagian barat wilayah Indonesia mengakibatkan ketimpangan pembangunan yang cenderung ke wilayah barat. Dalam

bidang ekonomi, wilayah Indonesia bagian timur menjadi lebih tertinggal di banding Indonesia bagian barat yang kemudian merembet ke semua indikator pembangunan, walaupun dari sudut ketersediaan sumber daya alam, wilayah Indonesia Timur menyimpan potensi yang lebih besar.

Dalam berbagai diskusi maupun perdebatan terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke wilayah lain telah banyak digulirkan. Usulan agenda pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur adalah sebagai bagian dari Visi Indonesia 2033 tahun 2008 (Bisnis.com Jakarta, 2011) untuk merubah paradigma pembangunan nasional. Selama ini paradigma lama telah mewariskan sejumlah permasalahan besar di ibu kota Jakarta maupun nasional. Usulan pemindahan Ibu Kota oleh Tim Visi Indonesia 2033 ini lebih didasarkan pada kepentingan bangsa Indonesia di masa depan. Bertolak dari perkembangan tiga puluh tahun terakhir, terlihat adanya indikasi rendahnya kualitas kebijakan dan implementasi kebijakan strategis dalam pengelolaan pembangunan nasional, maka usulan Tim Visi Indonesia 2033 berangkat dari pertimbangan yang kompleks dengan

memperhatikan faktor-faktor penyebab (*underlying causes*) dan faktor-faktor penggerak (*key drivers*) secara utuh.

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur menjadi “*The Best City on Earth*” baik sebagai simbol identitas bangsa; modern dan berstandar internasional; smart green, beautiful, sustainable; tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien; dan mendorong pemerataan ekonomi di kawasan timur (Bappenas, 2019). Hal ini tentunya sejalan dengan kebijakan pemerintah sesuai Nawacita ke-3 “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, dan searah dengan kebijakan pembangunan nasional yang mengintegrasikan peran dan fungsi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Secara khusus, di bidang pertahanan dan keamanan, Presiden RI pernah menyampaikan bahwa: “Saya minta gelar pasukan TNI juga memperhatikan perubahan paradigma pembangunan nasional kita yang tidak lagi Jawa Sentris, tetapi Indonesia Sentris.” (Rapat terbatas sinkronisasi penataan Gelar Satuan TNI dengan Pembangunan Nasional, 2017). Pada akhirnya, tahun 2019, Presiden RI memohon dukungan dari DPR dan seluruh rakyat Indonesia untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Hal ini mengisyaratkan bahwa, pembangunan pertahanan dan keamanan negara melalui pengembangan dan penguatan TNI di luar Jawa merupakan suatu kebutuhan yang harus segera diwujudkan dalam mendorong pembangunan nasional di daerah, khususnya di Ibu Kota Negara yang baru.

Analisa Lingkungan Strategis dan Prediksi Ancaman

Secara umum dinamika perkembangan lingkungan strategis pada tataran global,

regional, dan nasional memberikan kontribusi dalam membangun tren atau kecenderungan situasi keamanan (Permenhan Nomor 24 Tahun 2015). Analisa terhadap dinamika perkembangan lingkungan strategis sebagai faktor penggerak yang dapat menentukan tren atau kecenderungan situasi keamanan tersebut dapat dijadikan dasar dalam memprediksi adanya berbagai ancaman, hambatan, sekaligus sebagai peluang yang akan dihadapi. Pembangunan postur pertahanan negara yang memperhitungkan kekuatan, kemampuan dan gelarpun senantiasa memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis, sehingga diharapkan akan selalu mampu beradaptasi dengan perubahan dan intensitas ancaman dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Beberapa isu strategis yang mempengaruhi pertahanan dan keamanan negara dan perlu dipertimbangkan meliputi: keamanan kawasan Indo-Pasifik; modernisasi militer, perlombaan persenjataan, dan proliferasi senjata pemusnah masal; terorisme dan radikalisme; konflik intra dan antarnegara; masalah perbatasan dan kejahatan lintas negara; keamanan informasi dan pertahanan siber; isu demografi; isu lingkungan hidup serta keamanan pangan, air, dan energi; bencana alam; serta pandemi (Permenhan Nomor 24 Tahun 2015).

Berdasarkan analisa strategis dan identifikasi terhadap prediksi ancaman yang sangat dinamis memungkinkan terjadinya penggabungan berbagai jenis ancaman. Oleh karenanya ancaman saat ini dan kedepan dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu ancaman militer baik bersenjata maupun tidak bersenjata, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida. Dilihat dari sumbernya, ancaman tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, serta dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara, yang bersifat nasional, regional dan internasional. Adapun dampak yang ditimbulkan meliputi segala aspek kondisi sosial yang meliputi ideologi, politik, ekonomi,



sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Lebih khusus, prediksi ancaman yang mungkin bisa terjadi sewaktu-waktu di wilayah Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur, adalah munculnya ancaman yang dipicu oleh permasalahan di wilayah perbatasan darat dengan Malaysia; permasalahan wilayah perbatasan laut dengan Malaysia dan Filipina; permasalahan di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI-II); dan konflik internal antar suku, ras dan agama masih dianggap bisa menjadi pemicu permasalahan.

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Tinjauan Aspek Pertahanan dan Keamanan

Dari aspek tinjauan pertahanan dan keamanan, dalam perumusan desain pembangunan pertahanan dan keamanan negara dikaitkan

dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur tetap mempertimbangkan dinamika perkembangan lingkungan strategis dengan berbagai kemungkinan ancaman yang ditimbulkan, baik yang bersifat aktual maupun potensial.

Secara geografis, wilayah Kalimantan Timur berada di Pulau Kalimantan yang terletak di tengah wilayah NKRI, di sebelah barat terlindung oleh pulau Sumatera, sebelah selatan terlindung oleh pulau Jawa, sebelah timur terlindung oleh pulau Sulawesi dan sebelah utara berbatasan darat secara langsung dengan Malaysia (Sarawak).

Dari sisi wilayah, Kalimantan Timur merupakan hamparan dataran rendah tanpa pegunungan dan perbukitan aktif serta berada diluar jalur cincin gunung api (*ring of fire*), sehingga wilayah ini relatif aman dari ancaman bencana alam dan sangat ideal untuk pengembangan pembangunan. Dengan kondisi wilayah seperti ini, maka Kalimantan Timur cukup ideal dijadikan sebagai Ibu Kota Negara Indonesia yang baru.

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur, dari tinjauan aspek pertahanan dan keamanan negara, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur akan mempengaruhi gelar kekuatan

dan kemampuan pertahanan dan keamanan yang ada saat ini, baik gelar pasukan maupun alutsista.

- b. Secara geografis, tata ruang wilayah akan mempengaruhi rumusan kebijakan lapisan medan pertahanan (*layer defence*) yang sudah di bentuk, baik medan pertahanan penyanggah yang berada di luar garis batas ZEE beserta lapisan udara di atasnya; medan pertahanan utama yang berada mulai dari batas laut ZEE sampai dengan laut teritorial beserta lapisan udara di atasnya; dan medan pertahanan dalam yang berada di daerah-daerah perlawanan pada wilayah kompartemen strategis darat, termasuk wilayah perairan kepulauan dan lapisan udara di atasnya, meliputi daerah pertempuran, daerah komunikasi, dan daerah pangkal pertahanan dan perlawanan.
- c. Hal yang juga perlu dipertimbangkan terkait medan pertahanan adalah kemungkinan serangan militer oleh negara lain, terutama negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Jika Ibu Kota Negara terletak di daratan yang sama dengan perbatasan darat antar negara, maka Ibu Kota Negara tersebut akan menjadi lebih beresiko terhadap serangan militer negara tersebut. Hal ini karena negara penyerang memperoleh kemudahan tumpuan pendarat untuk memobilisasi kekuatan militernya.

Dengan beberapa pertimbangan tersebut, sebagai Ibu Kota Negara, maka wilayah Kalimantan Timur harus memenuhi kriteria perimeter pertahanan dan keamanan negara yang mampu menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa Indonesia.

Disamping itu juga harus mampu meminimalkan kerentanan suatu negara (*to minimize vulnerability of state*) dan mampu memberikan bantuan dalam penyelesaian permasalahan regional maupun internasional dan sebagainya

Pembangunan Pertahanan dan Keamanan di Ibu Kota Negara

Sesuai UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah terkait kewenangan Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Ibukota sebagai daerah otonom dijelaskan bahwa urusan pemerintah yang absolut yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Kewenangan Pemerintah Pusat ini tidak diotonomikan ke Pemda (Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014). Demikian halnya terkait bidang pertahanan dan keamanan Ibu Kota Negara Indonesia sebagai wilayah strategis nasional yang harus memiliki indikator pertahanan dan keamanan yang jelas dan terukur serta bisa memberikan dampak kenyamanan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional, termasuk di kawasan.

Pembangunan wilayah pertahanan dan keamanan diarahkan untuk mewujudkan wilayah pertahanan berorientasi Indonesia Sentris dengan mengutamakan pembangunan di daerah perbatasan, daerah rawan konflik, pulau kecil terluar menuju tercapainya Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional (Perpres Nomor 8 Tahun 2021). Pembangunan tersebut diselenggarakan secara terintegrasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penataan ruang wilayah nasional/daerah dengan tata ruang wilayah pertahanan untuk mewujudkan ruang, alat, kondisi (RAK) juang pertahanan



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

dan keamanan negara yang tangguh melalui mewujudkan tata ruang wilayah pertahanan darat, laut dan udara, serta mewujudkan kesiapan SDM, SDB/A dan sarana prasarana (Kepmenhan Nomor 487 Tahun 2020).

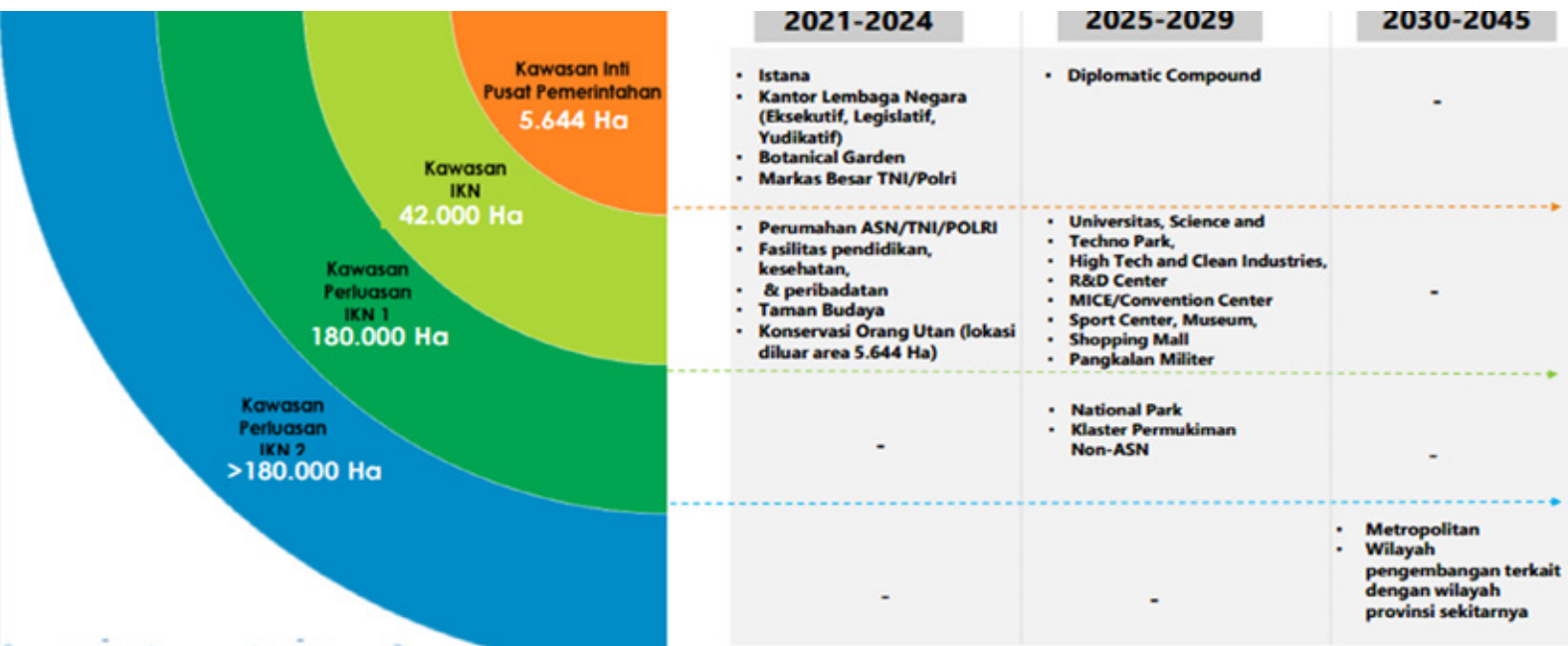
Penetapan suatu lokasi untuk Ibu Kota Negara harus memenuhi kriteria dan parameter kondisi pertahanan dan keamanan negara yang kondusif, terutama berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk meminimalkan kerawanan negara (*to minimize vulnerability of state*).
- b. Melindungi dan menjaga kedaulatan

negara, kesatuan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa (*safeguard to territorial*).

- c. Membantu penyelesaian permasalahan regional dan internasional (*help to gain regional and international affair*).
- d. Keleluasaan manuver dalam merespon ancaman.
- e. Pertimbangan pembangunan infrastruktur pertahanan dan keamanan.
- f. Ketersediaan fasilitas pendukung.

Untuk itu, penetapan suatu lokasi Ibu Kota



Sumber foto : Kementerian PPN/Bappenas, 2019

Negara harus memiliki benteng pertahanan (*buffer zone*) yang memiliki kriteria: Lokasi Ibu Kota Negara yang posisinya harus terlindung dan tidak berada di depan atau belakang teritorial negara; Ibu Kota Negara harus memiliki akses darat, laut dan udara jika menghadapi situasi kontinjensi; dan Ibu Kota Negara harus memiliki akses transportasi dan komunikasi yang baik dan memudahkan mobilisasi personel dalam kondisi darurat.

Dalam rangka mewujudkan pertahanan dan keamanan negara yang tangguh di wilayah Ibu Kota Negara Kalimantan Timur, maka pembangunan pertahanan dan keamanan perlu memenuhi standar kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan di Ibu Kota Negara, melalui peningkatan dan penguatan Postur TNI, baik TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas dalam *Network Centric Warfare (NCW)* melalui:

- Pembangunan kekuatan Satuan TNI, yang meliputi : organisasi (pembentukan satuan baru, relokasi, validasi); personel; materiil; dan fasilitas

- Pengembangan kemampuan Satuan TNI yang meliputi: kemampuan intelijen, kemampuan pertahanan dan keamanan, kemampuan diplomasi, kemampuan pemberdayaan wilayah pertahanan, dan kemampuan dukungan.
- Penggelaran Satuan TNI, disesuaikan dengan geografi wilayah dan kebutuhan matra.
- Grand design zonasi dan rencana pertahanan pembangunan:

Dari gambaran uraian diatas terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur dari tinjauan aspek pertahanan dan keamanan dapat disimpulkan bahwa:

- Dari tinjauan aspek pertahanan dan keamanan, perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur, akan mempengaruhi postur pertahanan negara, khususnya Satuan TNI dan berpotensi untuk penataan ulang terhadap tata ruang wilayah pertahanan.



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

- b. Perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur memiliki konsekuensi terhadap perlunya merumuskan kembali desain gelar kekuatan dan kemampuan TNI dalam melindungi Ibu Kota Negara yang baru sebagai *Center of Gravity (COG)* Indonesia.
 - c. Bertolak dari kondisi Ibu Kota Negara di Jakarta saat ini, maka perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur perlu difokuskan pada pemindahan pusat pemerintahan negara saja, sehingga pusat ekonomi dan bisnis tetap berada di kota Jakarta.***
- Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: Kep/487/M/V/2020 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2020, tanggal 6 Mei 2020 hal 14
 - Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 24 Tahun 2015 : Strategi Pertahanan Negara Tahun 2015, hal 7
 - Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, pokok-pokok kebijakan umum, hal. 10 - 11.
 - Rapat Terbatas terkait Sinkronisasi Penataan Gelar Satuan TNI dengan Pembangunan Nasional pada tanggal 12 Januari 2017
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, Pasal 10

Daftar Pustaka

- Adrianof, Chaniago. 2011 6 Alasan pindah ibukota versi Tim Visi Indonesia 2033, Bisnis.com Jakarta
- Bahan paparan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tahun 2019

AKTUALISASI SISTEM INFORMASI KESEHATAN YANG TERINTEGRASI DI KEMHAN UNTUK PERTAHANAN NEGARA

Oleh: drg. Pongki Sipahutar, Sp.KG

Analisis Pertahanan Negara Madya Setditjen Kuathan Kemhan

Perkembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi sekarang ini menuntut kita untuk menerapkan pengolahan sistem informasi menggunakan komputerisasi. Demikian juga dengan sistem informasi kesehatan. Banyak kemudahan yang diberikan meskipun masih terdapat kekurangannya. Kemudahan yang diberikan berupa informasi yang cepat, tepat dan akurat. Dengan sistem informasi yang berbasis komputer mempermudah komunikasi dan pengambilan kebijakan berbasis data. Selain itu sistem informasi akan memberikan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan aplikasi yang dibuat sehingga informasi yang dihasilkan juga sesuai dengan apa yang kita inginkan. Informasi yang dihasilkan dapat tersajikan tentang, peta lokasi, kekuatan sumber daya kesehatan, kemampuan sumber daya kesehatan, daya tahan sumber daya kesehatan, *outbreak* yaitu berupa data tentang penyakit yang pernah terjadi yang menyebabkan KLB/Pandemik), dan data mengenai kebencanaan.

Komponen Peta Geomedik



Resource MAP



Sumber dari : Pusat Penanggulangan Krisis Kementerian Kesehatan RI (<https://dokumen.tips/embed/v1/pembuatan-peta-geomedik.html>)

Sistem informasi kesehatan yang berbasis Komputer sangat tepat diterapkan di Lingkungan Kemhan dan TNI, karena kebutuhan informasi kesehatan dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis data serta penyajian informasi harus tepat, cepat dan akurat. Apabila menggunakan metode yang sekarang maka dengan wilayah Indonesia yang luas dan tersebar sulit mendapatkan informasi yang tepat, cepat dan akurat ke daerah dan dari seluruh daerah.

Dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2020-2024, berdasarkan perkembangan lingkungan strategis dinyatakan bahwa, salah

satu jenis ancaman nyata adalah ancaman nonmiliter bidang kesehatan. Dalam menghadapi ancaman nonmiliter bidang kesehatan diperlukan pertahanan nirmiliter yang tangguh. Pertahanan nirmiliter yang tangguh dibentuk secara komprehensif, salah satunya dengan mengintegrasikan sistem informasi kesehatan ke dalam sistem informasi kesehatan pertahanan Negara. Oleh karena itu diperlukannya sistem informasi kesehatan pertahanan Negara yang terintegrasi melalui penyusunan berbagai kebijakan, pedoman dan arahan penyelenggaraan, sehingga dapat membentuk pertahanan negara yang tangguh, efektif dan efisien.

Dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2020-2024 juga dinyatakan bahwa Kementerian/Lembaga ditempatkan sebagai unsur utama dalam pertahanan nirmiliter sedangkan Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebagai unsur pendukung. Kemhan dalam hal ini Direktorat Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan (Ditkes Ditjen Kuathan Kemhan) mempunyai dua posisi yaitu sebagai komponen utama dalam pertahanan militer dan unsur pendukung dalam pertahanan nirmiliter.

Mencermati kejadian-kejadian yang telah ada mulai dari kejadian luar biasa / wabah / pandemik yang terjadi di Indonesia ataupun di dunia, maka terlihat banyak kesulitan terjadi mulai dari penanganan hingga penyelesaiannya. Selain permasalahan teknis lapangan berupa pengobatan, perawatan dan pasca perawatan, maka permasalahan terkait informasi menjadi faktor yang sangat penting. Sebagai contoh masalah sering terjadi salah informasi di lapangan terkait jumlah, kegiatan maupun langkah-langkah di dalam penanganan. Ditambah lagi berita-berita dari media online yang tidak diketahui sumbernya maupun kebenaran beritanya. Kondisi ini patut dikritisi dengan membuat suatu sistem informasi mengenai kesehatan yang terintegrasi yang dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, efektif dan efisien. Sistem informasi kesehatan pertahanan negara yang terintegrasi ini merupakan suatu sistem tunggal

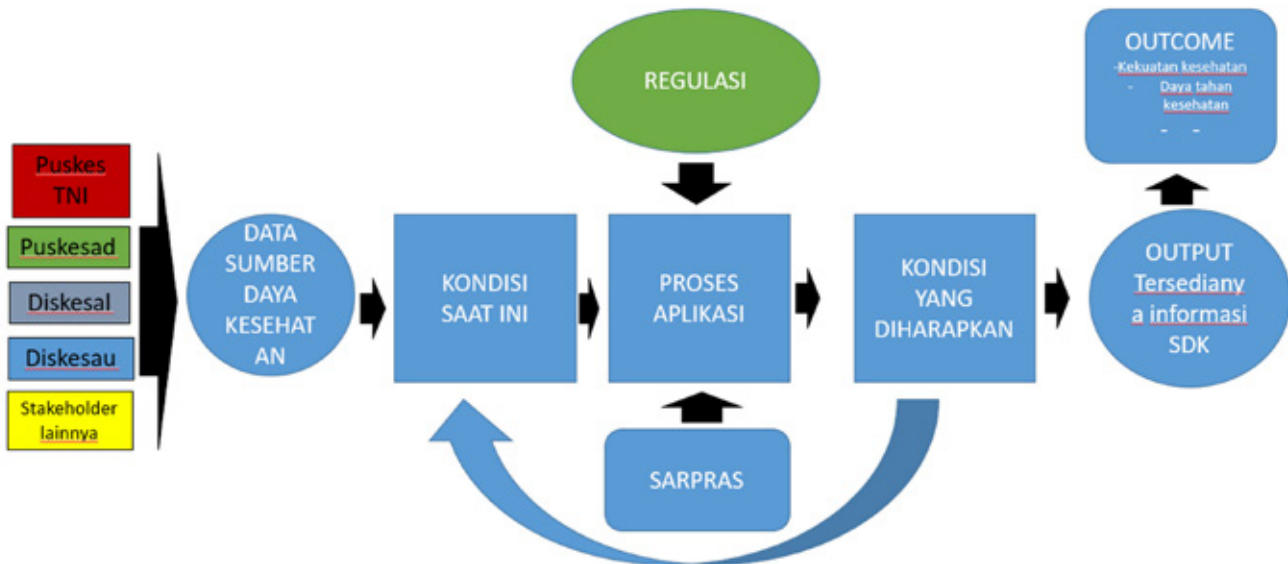
yang digunakan sebagai pusat informasi yang terpercaya dan dikendalikan dari suatu tempat. Sumber data yang diperoleh dari daerah diolah untuk yang menghasilkan informasi yang valid uptodate, dan tetap terjadi kerahasiaannya tetap terjaga.

Konsep Sistem Informasi Kesehatan Pertahanan Terintegrasi

Sistem Informasi Kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu (dr. Guardian Yoki Sanjaya, Buletin Pusdatin Kemenkes, 2016). Sistem informasi kesehatan bermanfaat untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan. Disamping itu Informasi kesehatan selalu diperlukan dalam pembuatan program kesehatan mulai dari analisis situasi, penentuan prioritas, pembuatan alternatif solusi, pengembangan program, pelaksanaan dan pemantauan hingga proses evaluasi terhadap pelaksanaan program-program kesehatan (dr. Guardian Yoki Sanjaya, Buletin Pusdatin Kemenkes, 2016). Dari aspek pertahanan nirmiliter bidang kesehatan, informasi kesehatan harus selalu terkini untuk mengetahui kekuatan kesehatan.

Dari sisi realita yang ada sistem Informasi Kesehatan secara nasional masih belum terkoneksi antara semua stakeholder kesehatan yang ada, masih terfragmentasi setiap intitusi. Perlu mengkoneksikan seluruh stakeholder kesehatan untuk pertahanan nirmiliter, yang terdiri dari Kemenkes sebagai unsur utama, Kementerian/Lembaga lainnya sebagai unsur pendukung. Jika diperlukan, seluruh industri kesehatan dan industri pendukung bidang kesehatan juga dapat diinterintegrasikan. Bila saat Negara dalam kondisi darurat maka seluruh stakeholder harus bersatu padu mengatasinya. Meski peluangnya tetap ada akan tetapi hambatannya pun juga banyak dari berbagai aspek. Oleh karena itu sistem informasi kesehatan harus terintegrasi untuk pertahanan Negara.

SISTEM INFORMASI KESEHATAN PERTAHANAN NEGARA YANG TERINTEGRASI



Sumber foto : Penulis

Pada hakekatnya membangun sistem informasi kesehatan yang terintegrasi adalah membangun sistem jaringan informasi yang terpusat dengan seluruh komponen kesehatan sebagai stakeholdernya dalam hal ini di lingkungan Kemhan dan TNI. Membangun jaringan Informasi kesehatan yang terintegrasi di lingkungan Kemhan dan TNI tidak mudah. Perlu langkah-langkah yang terencana dan matang agar kendala-kendala yang ada dapat diatasi. Berdasarkan literatur dan pengalaman dilapangan ditemukan sejumlah kendala dalam pembangunan sistem informasi kesehatan pertahanan negara yang terintegrasi, antar lain regulasi, sumber daya manusia, koordinasi, perangkat keras dan perangkat lunak, serta monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu dalam pembangunan sistem informasi kesehatan pertahanan terintegrasi dilakukan dengan melalui pendekatan regulasi, pendekatan sumber daya manusia, pendekatan koordinasi, pendekatan perangkat lunak dan perangkat keras, serta pendekatan monitoring dan evaluasi.

Pendekatan Regulasi

Pada aspek regulasi, perlu disusun suatu regulasi yang mengatur sistem informasi kesehatan pertahanan Negara yang terintegrasi. Perlunya landasan hukum yang kuat untuk membangun suatu sistem informasi kesehatan pertahanan negara yang terintegrasi. Seluruh komponen di bidang kesehatan harus terlibat untuk membangun sistem informasi kesehatan pertahanan negara yang terintegrasi di Kementerian Pertahanan. Hal ini juga merupakan bentuk komitmen dari seluruh komponen yang terlibat dalam suatu sistem informasi kesehatan pertahanan negara. Regulasi harus secara spesifik menjawab kebutuhan integrasi sistem informasi kesehatan pertahanan negara.

Pembuatan kebijakan itu didasarkan bahwa pembuatan regulasi adalah untuk mengatasi suatu permasalahan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, menciptakan

ketertiban dan keamanan, memperbaharui perilaku masyarakat, dan untuk mengarahkan atau mendorong pelaksanaan pembangunan (Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi, 2011). Regulasi selayaknya dirumuskan dengan cara yang sederhana, jelas, tegas dan konsisten sehingga mudah dipahami dan dioperasikan.

Dengan demikian, pembuatan regulasi sistem informasi kesehatan pertahanan Negara, yang terintegrasi di Ditjen Kuathan Kemhan dalam rangka mendukung pertahanan negara merupakan hal penting dan merupakan langkah pertama sebelum membuat sistem informasi pertahanan Negara yang terintegrasi.

Pendekatan Koordinasi Stakeholder Bidang Kesehatan

Sistem informasi kesehatan nasional secara umum masih terfragmentasi, demikian juga sistem

informasi kesehatan untuk pertahanan Negara. Masing-masing angkatan memiliki sistem informasi sendiri yang belum terintegrasi. Ketika dibutuhkan informasi yang menyeluruh maka membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini menyulitkan dalam koordinasi tentang kekuatan kesehatan yang ada dalam waktu yang cepat. Ditambahkan lagi dengan kondisi geografis Indonesia, khususnya pada daerah terpencil dan perbatasan, akan berdampak pada kemampuan untuk koordinasi informasi kesehatan.

Oleh karena itu diperlukan kemampuan untuk melakukan manajemen data mulai dari pengumpulan, pengolahan, dan analisis data serta penyajian dan diseminasi informasi baik di pusat dan daerah cepat, tepat dan efisien. sehingga menghasilkan informasi kesehatan yang valid dan reliabel.

Dalam aspek koordinasi sistem informasi kesehatan yang terintegrasi untuk pertahanan Negara di lingkungan Kemhan dan TNI, secara ideal



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

perlu tersedia suatu harus Standar Operasional Prosedur (SOP), terkait beberapa hal yang harus dikoordinasikan seperti, membuat indikator-indikator yang jelas dari berbagai aspek yang dikoordinasikan, menyamakan persepsi sehingga memudahkan dalam koordinasi dan menciptakan sinergitas, yang melibatkan seluruh stakeholder bidang kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI. Disamping itu fungsi interkoneksi mulai dari input data, verifikasi data, pengolahan data dan informasi yang diberikan juga perlu dihadirkan.

Pendekatan Sumber Daya Manusia

Menurut Abdurrahmat Fathoni (2006:8), sumber daya manusia adalah merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia, karena manusia merupakan unsur mutlak dianalisis dan dikembangkan dengan optimal. Permasalahan adalah kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih rendah. Padahal sumber daya manusia memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi sistem informasi kesehatan terintegrasi untuk pertahanan negara.

Sehubungan dengan hal itu, pada dasarnya banyak metode yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan kinerja SDM, salah satunya yang yaitu dapat dilakukan, yaitu dengan Pendidikan dan Pelatihan di bidang teknologi informasi bagi pengelola sistem informasi kesehatan pertahanan Negara. Selain itu promosi dalam suatu organisasi/instansi adalah suatu keharusan dan merupakan upaya untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. Pentingnya promosi bagi seseorang adalah sebagai salah satu bentuk reward (penghargaan). Disisi lain dan bentuk punishment (hukuman) dapat diberikan saat yang pegawai melakukan kesalahan. Diharapkan dengan adanya penghargaan berupa promosi dan hukuman dapat meningkatkan produktivitas kerja sekaligus memberikan peringatan kepada seseorang pegawai untuk tetap melakukan hal yang baik dan benar.

Pendekatan Perangkat Lunak Dan Perangkat Keras

Dalam sistem informasi kesehatan terintegrasi untuk pertahanan Negara, perangkat lunak



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

(*software*) berupa aplikasi program dan perangkat keras (*hardware*) berupa komputer merupakan komponen utama dan hal yang sangat penting. *software* dan *hardware* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Perkembangan *software* dan *hardware* saat ini sangatlah cepat, sehingga sangat perlu dilakukan penyesuaian di wilayah pusat maupun di daerah. Disisi lain perangkat keras yang digunakan haruslah khusus untuk sistem pertahanan negara yang terintegrasi, dan penggunaannya tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang lain. Namun kondisi sekarang terbatasnya perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) di berbagai jenjang, sehingga menyulitkan integrasi sistem informasi kesehatan pertahanan Negara.

Untuk menyikapi kondisi yang ada tersebut, dirasakan perlu adanya pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak secara bertahap sesuai kemampuan anggaran yang ada. Selain itu berbagai metodepun sebenarnya dapat digunakan dalam pengembangannya. Kemudian pada tahap berikutnya perlu adanya pemeliharaan dan pemajanaan sistem informasi baik di wilayah pusat maupun di daerah yang menjadi prioritas penganggaran rutin.

Pendekatan Monitoring Dan Evaluasi

Menurut William N. Dun 2000, kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun. Monitoring digunakan pula untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, mengoreksi penyalahgunaan aturan dan sumber-sumber, serta untuk mengupayakan agar tujuan dicapai seefektif dan seefisien mungkin.

Evaluasi program merupakan salah satu fungsi dari manajemen program, evaluasi program dilakukan terhadap seluruh atau sebagian unsur-unsur program serta terhadap pelaksanaan program. Evaluasi program harus dan dapat diselenggarakan secara terus menerus, berkala, dan atau sewaktu-waktu. Kegiatan evaluasi ini

dapat dilakukan pada saat sebelum, sedang, atau setelah program dilaksanakan, evaluasi merupakan kegiatan yang bermaksud untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai, apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, dan atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan (William N. Dunn 2000). Evaluasi program berguna bagi pengambil keputusan untuk menetapkan apakah program akan dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas atau ditingkatkan.

Monitoring dan evaluasi dilakukan pada setiap langkah - langkah yang sudah dilaksanakan mulai perencanaan, pelaksanaan sampai selesainya kegiatan pembangunan sistem informasi kesehatan pertahanan negara yang terintegrasi. Dilakukan monitoring dan evaluasi pada langkah penyusunan regulasi, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan perangkat lunak dan keras dan meningkatkan koordinasi antar institusi.

Kesimpulan

Sistem informasi kesehatan pertahanan Negara yang terbangun secara terintegrasi dan sistematis sangatlah penting untuk mengetahui kekuatan kesehatan dan sebagai pedoman dalam membuat kebijakan berbasis data. Sementara itu, kondisi terintegrasinya sistem informasi kesehatan di lingkungan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan (Ditjen Kuathan Kemhan) akan dapat mewujudkan dukungan sistem pertahanan negara yang tangguh di bidang kesehatan.

Dari beberapa pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa proses pengintegrasian sistem informasi dibidang kesehatan pertahanan Negara yang ada di lingkungan Ditjen Kuathan Kemhan akan dapat tercapai dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut, membuat regulasi sebagai dasar aturan hukumnya, membangun koordinasi yang kuat tentang informasi kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI, melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta kesempatan promosi bagi pegawai, meningkatkan

kemampuan perangkat keras dan perangkat lunak, serta melakukan monitoring dan evaluasi.

Terkait hal tersebut menurut penulis ada 2 saran yang perlu diajukan kepada pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dalam rangka mendukung pertahanan negara adalah sebagai berikut:

Pertama, Kemhan sebaiknya melakukan pengintegrasian sistem informasi kesehatan pertahanan Negara dilingkungan Kemhan dan TNI sedini mungkin yang akan menjadi role model dalam rangka membangun sistem informasi kesehatan pertahanan Negara yang terintegrasi secara nasional guna mendukung pertahanan nirmiliter.

Kedua, Kemhan sebaiknya menjadi inisiator dengan mengajak unsur utama pertahanan nirmiliter dalam pembuatan sistem informasi kesehatan pertahanan negara yang terintegrasi secara nasional.

Daftar Pustaka

- Abdurrahmat, Fathoni. 2006. Manajemen Sumber daya Manusia. Rineka Cipta, Jakarta.
- Awi Muladi Wijaya MKM, 2017 Perkembangan Terkini dan masa depan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Indonesia, updated 11 oktober 2017
- Bappenas, 2011. Kedeputan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Direktorat analisa peraturan dan perundang-undangan.
- Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- G.R.Terry dan Rule,L.W.2003 "Dasar-dasar manajemen"Terjemahan Ticoula G.A. Bumi Aksara. Jakarta
- Handoko, Hani., 2009. Manajemen, Edisi II, BPFE dan LMP2M-YKPN, Jakarta
- Harianja, Marihot Tua Effendi. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia, Penerbit PT. Grasindo, Jakarta.Manajemen,Edisi 7,jilid1,Ricky.W.Griffin,penerbit Erlangga .2004
- Junaedi Ahmat Fadil SKM, MPH, dan Barsasela Diana, SKM, ST, S.Kom, MKM, Teknologi Informasi Kesehatan I, Aplikasi Komputer dasar, Pusdik SDMKes Edisi thn. 2018
- Sanjoyo Raden, Sistem informasi kesehatan, FMIPA UGM, Aothor : Yuliani Kurnia <http://www.yoyoke.web.ugm.ac.id>
- Sumarsono, Sonny. 2003. Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Yogyakarta : Graha Ilm
- SISTEM INFORMASI KESEHATAN DI INDONESIA Diposkan pada 1 November 2014 oleh realtimehealth
- UU No.34 Thn 2004 Tentang TNI
- UU No.No.23 Thn 2019
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 2021 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2020-2024
- Permenhan No. 1 tahun 2021 tentang Jagara Haneg th 2020-2024
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 Tentang Peta Jalan Sistem Informasi Kesehatan Tahun 2015-2019 (<http://www.pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdati/Lain-lain/PMK-No-97-Th-2015-ttg-Peta-Jalan-Sistem-Informasi-Kesehatan-Tahun-2015-2019.pdf>)
- Permenhan no. 24 tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Pertahanann Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

ASEAN CENTER OF MILITARY MEDICINE (ACMM) SEBAGAI WADAH KERJASAMA KESEHATAN MILITER DALAM MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA

Oleh: Antonius Tri Novianto, S.T., M.M.,

Analisis Pertahanan Negara Ahli Madya Setditjen Kuathan Kemhan



Sumber: <https://thediplomat.com/2017/05/time-for-aseans-defense-ministers-meeting-to-put-traditional-security-on-the-agenda/>

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menyatakan bahwa pelaksanaan hubungan luar negeri Indonesia didasarkan pada asas kesamaan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Hal ini merupakan pengejawantahan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan

tujuan tersebut Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan kegiatan hubungan luar negeri dengan berbagai negara maupun organisasi internasional, baik di tingkat regional maupun global.

Pelaksanaan kegiatan hubungan luar negeri, baik regional maupun global, dilaksanakan melalui forum bilateral atau multilateral serta diabdikan bagi kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia

pada Organisasi Internasional mengamanatkan bahwa keanggotaan dan kontribusi Indonesia pada organisasi Internasional merupakan perwujudan dari diplomasi multilateral dan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) Perpres tersebut menyatakan bahwa keanggotaan dan kontribusi Indonesia diabdikan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional.

Dasar tersebut menjadi acuan bagi tiap Kementerian dan Lembaga sehingga jalinan hubungan internasional ditujukan untuk dapat memberikan manfaat untuk sebesar-besarnya kepentingan nasional. Manfaat kualitatif yang bisa diperoleh antara lain berupa perdamaian dan keamanan internasional, serta kemanusiaan. Sebagai contoh, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah menjalin kerja sama regional melalui ASEAN yaitu dengan terlibat dalam penandatanganan *Joint Declaration of the ASEAN Defence Ministers on Promoting Defence Cooperation for a Dynamic ASEAN Community* pada *ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM)* ke-10 di Vientiane, Lao tanggal 25 Mei 2016. Salah satu isi dari deklarasi bersama tersebut adalah tentang *ASEAN Center of Military Medicine (ACMM)*

Sejarah Pembentukan *ASEAN Center of Military Medicine (ACMM)*.

ASEAN merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemajuan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya sekaligus untuk memajukan perdamaian dan stabilitas keamanan regionalnya. ASEAN mempunyai 3 pilar kerjasama yaitu politik dan keamanan, ekonomi serta sosial dan budaya.

Pilar politik dan keamanan ASEAN adalah bentuk kerjasama yang ditujukan untuk memelihara perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan, termasuk untuk memasyarakatkan nilai-nilai bersama seperti HAM dan demokrasi. Salah satu bentuk kerja sama pilar tersebut yakni *ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM)*, suatu pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN di kawasan guna meningkatkan transparansi, keterbukaan dan rasa saling percaya diantara negara-negara anggota ASEAN. ADMM merupakan suatu platform kerja sama antar Menteri Pertahanan ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan *Confidence Building Measures (CBM)* serta menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan melalui dialog dan kerja sama praktis.

Kementerian Pertahanan Kerajaan Thailand dan Federasi Rusia adalah *Co-Chairs* (Ketua Bersama) dari *ASEAN Defence Ministers Meeting - Plus Experts' Working Group on Military Medicine (ADMM-Plus EWG pada Military Medicine)* selama periode 2014-2016. *Co-Chairs* ini telah mengusulkan suatu Rencana Kerja 3 Tahun yang diadopsi oleh Pejabat Senior Pertahanan ASEAN Meeting-Plus (*ADSOM-Plus*) di Nay Pyi Taw, Myanmar pada April 2014. Sejalan dengan diadopsinya Rencana Kerja 3 Tahun EWG pada *Military Medicine*, *Co-Chairs* bekerja untuk pembentukan *ASEAN Military Medicine Coordination Center (AMMCC)* di Thailand pada tahun 2015. Selama 5th *ADMM-Plus EWG on Military Medicine Meeting / Senior Medical Planners' Workshop* yang diadakan di Kota Pattaya, Thailand pada bulan Oktober 2014, dibahas struktur dan mekanisme Pusat yang sesuai terkait dengan konsep awal seperti: misi, tujuan serta pengaturan proses dan administrasi AMMCC. Selain itu, *Workshop* menyepakati perubahan nama dari AMMCC menjadi *ASEAN Center Of Military Medicine (ACMM)*.

Misi ACMM menciptakan kerjasama yang praktis, efektif dan berkesinambungan antar layanan kesehatan militer bagi negara anggota ASEAN dan negara plus, baik dalam situasi normal maupun kritis.

Tujuan ACMM untuk mengembangkan rencana tanggapan medis bersama, menilai kebutuhan medis dalam situasi kritis, melakukan kursus pelatihan/penelitian yang tepat dibidang pelayanan medis darurat serta berperan untuk menunjukkan solidaritas regional dengan mengintegrasikan kapasitas guna menanggapi tantangan bersama. Guna mencapai tujuan tersebut ACMM diharapkan dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan layanan kesehatan militer negara-negara ADMM-Plus, agen-agen terkait, dan organisasi-organisasi internasional mendukung semua bidang kerjasama medis militer, sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemampuan dan standardisasi pelayanan kesehatan militer;
- b. Harmonisasi kemampuan-kemampuan unik;
- c. Peningkatan kemampuan ACMM menjadi standar kelas dunia; dan
- d. Pembangunan berkelanjutan.

ACMM didirikan sebagai tindak lanjut dari adopsi makalah konsep (*concept paper*) tentang pembentukan ACMM pada ADMM ke-9 di Langkawi, Malaysia pada tahun 2015. Tujuannya untuk memperkuat dan mengembangkan pembentukan kerja sama praktis, efektif, dan berkelanjutan di antara *Military Medical Services (MMS) dari ASEAN Member States (AMS)*.

Pada ADMM ke-10 di Vientiane, *Lao People's Democratic Republic* pada tanggal 25 Mei 2016 para Menteri Pertahanan negara-negara anggota ASEAN telah menandatangani Deklarasi Bersama (*Joint Declaration of The ASEAN Defence Ministers on Promoting Defence Cooperation for a Dynamic ASEAN Community*) yang berisi antara lain: mengadopsi *the Terms of Reference (TOR) / Kerangka Acuan ACMM*, yang menggambarkan detail operasional dan modalitas untuk penerapannya. Ditinjau dari aspek legal formal, deklarasi bersama para Menteri Pertahanan ASEAN merupakan dokumen resmi yang menjadi pedoman bagi komunitas Pertahanan ASEAN dalam menyelenggarakan program-program yang telah direncanakan dan disepakati bersama diantara negara-negara anggota ASEAN. Dengan demikian, maka segala ketentuan teknis yang telah diadopsi dalam naskah Deklarasi Bersama tersebut menjadi dasar hukum yang mengikat para anggota ADMM, termasuk kewajiban untuk membayar iuran tahunan guna mendukung pelaksanaan *Expert Working Group (EWG) Military Medicine* dalam *Framework ACMM*.

Sesuai dengan mandat dan fungsinya, ACMM telah memfasilitasi, berkoordinasi dan melakukan kerja sama antara *MMS AMS* dan Negara-negara *Plus (Plus Countries)*, serta bekerja dalam kemitraan dengan lembaga terkait dan organisasi internasional dan regional untuk mendukung semua bidang kolaborasi medis militer. Bentuk kolaborasi tersebut antara lain: meningkatkan kemampuan pelayanan medis militer (*military medical service / MMS*) regional dengan melakukan lokakarya dan kursus-kursus latihan bersama; menilai dan menggunakan informasi medis dalam kondisi awal dan krisis secara berkala dari *MMS AMS* dan Negara-

"One Region, One Military Medical Teamwork"



Maritime Security



Military Medicine

"Good Medicine in Bad Place"



Peace-keeping Operations



Counter-Terrorism



Humanitarian Mine Action

Sumber: ACMM Annual report 2019

negara *Plus*; menyelaraskan kemampuan medis militer regional untuk interoperabilitas yang lebih baik dan memfasilitasi kerja sama teknis, ilmiah dan teknis penelitian.

Dasar Regulasi Keanggotaan Indonesia di ACMM

Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah Republik Indonesia selama ini telah melaksanakan hubungan luar negeri dengan berbagai negara dan organisasi regional maupun internasional serta pelaksanaan kegiatan hubungan luar negeri guna diabdikan

pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia Pada Organisasi Internasional menyatakan bahwa keanggotaan dan kontribusi Indonesia pada organisasi Internasional merupakan perwujudan dari diplomasi multilateral dan pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif. Disamping itu, keanggotaan dan kontribusi Indonesia bertujuan untuk meningkatkan peran dan kinerja di forum Internasional serta meningkatkan hubungan antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat Internasional.

Pemerintah menetapkan Keputusan Presiden Republik (Keppres) Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada *The ASEAN Center of Military Medicine* pada tanggal 9 November 2021. Terbitnya Keppres tersebut semakin memperkuat keberadaan Indonesia dalam organisasi dan sebagai payung hukum dalam melaksanakan seluruh aktivitas yang diselenggarakan oleh ACMM.

Tindak Lanjut Kontribusi Indonesia Melalui ACMM

Ditinjau dari aspek tugas pokok dan fungsi Satker di lingkungan Kementerian Pertahanan, kegiatan kerja sama ADMM bidang Kesehatan Militer dapat dilaksanakan secara kolaboratif antara Ditjen Strahan Kemhan dan Ditjen Kuathan.

Ditjen Strahan dalam hal ini Ditkersinhan Ditjen Strahan Kemhan sebagai *leading sector* yang berwenang dalam bidang kerjasama internasional. Adapun Ditjen Kuathan Kemhan dalam hal ini Direktorat Kesehatan Ditjen Kuathan Kemhan sebagai pendukung untuk menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas kesehatan Militer, baik dari jajaran Kementerian Pertahanan maupun TNI.

Hal ini sangat berkaitan erat dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh ACMM seperti yang tertuang di dalam TOR ACMM, dimana mandat dan fungsi ACMM yaitu memfasilitasi koordinasi dan kerja sama antara *Military Medical Services (MMS)* dari *ASEAN Member State (AMS)* dan negara-negara lainnya (*Plus Countries*), dan bekerja dalam kemitraan dengan lembaga terkait serta organisasi internasional



Sumber: <https://ipdefenseforum.com/2019/10/asean-doctors-share-data-expertise-to-boost-military-medical-capabilities/>



Sumber: ACMM Annual report 2019

dan regional dalam rangka mendukung semua bidang kolaborasi dibidang kesehatan militer.

Keanggotaan dan kontribusi Indonesia juga diabdikan sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional. Hal ini terlihat dari kegiatan-kegiatan yang telah diikuti oleh Indonesia terkait dengan ACMM yaitu :

- a. *The First ASEAN Center of Military Medicine Board of Directors' Meeting* yang diselenggarakan pada tanggal 2 s.d 4 Agustus 2016 di Bangkok, Thailand. Menghasilkan beberapa rencana kerja

yang meliputi penggantian nama ASEAN of Military Medical Coordination Center (AMMCC) menjadi ASEAN Center Of Military Medicine (ACMM), penyusunan "ASEAN Military Medical Handbook" yang meliputi mekanisme operasi untuk AMMCC dan SOPs (Standard Operation Procedure) untuk operasi medis militer gabungan dari negara- negara ADMM-Plus dalam mendukung Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan tukar menukar pengalaman dan keahlian diantara anggota (Military Medical Service) MMS dari negara-negara ADMM-plus.



Sumber: www.mindef.gov.sg

- b. *Multinational Medical Field Training Exercise (MEDEX) – 2019* yang diadakan pada tanggal 11 s.d 16 Maret 2019 di Lucknow, India dan dihadiri oleh 10 orang perwakilan negara yang tergabung dalam ACMM. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mengembangkan *mekanisme respons regional* yang terpadu dan sinkron dalam manajemen kedaruratan medis selama bencana alam dan untuk menetapkan standar prosedur operasi respon medis selama situasi krisis. Hasil kegiatan meliputi berbagai peran ACMM dalam proses koordinasi di bawah SASOP diantara ASEAN dan lembaga terkait, mempelajari dan saling berbagi bidang umum kerjasama lapangan kesehatan militer dalam menanggapi bencana alam ataupun buatan manusia yang mempengaruhi sejumlah besar penduduk sipil yang diikuti dengan terjadinya epidemi serta saling berbagi konsep umum tentang praktik terbaik selama situasi bencana.
- c. *Military-Medical Emergency Response Team (M-MERT) Exchange Training* pada tanggal 17 s.d. 21 Juni 2019 di Bangkok, Thailand. Adapun materi yang diikuti antara lain ASEAN HADR *Response Mechanism*, *Draft The Military-MERT*, Paparan tentang *Draft Handbook of MERT Exchange Training* oleh Col Jiraporn Chomsri, Thailand dan kegiatan *FTX* dengan skenario *FTX* yaitu gempa bumi yang menimbulkan korban massal. Kegiatan lainnya adalah menguji *Management Mass Casualty*, pengangkutan korban dari Area Bencana ke Rumah Sakit lapangan yang sudah didirikan oleh *M-MERT* dan evakuasi korban yang sudah menjalani pertolongan pertama ke Rumah Sakit.



Sumber: ACMM Annual report 2019

d. *2nd ACMM Liaison Officers' Meeting 2019* yang diadakan pada tanggal 15 s.d 20 Juli 2019 di Hotel Kantary Hill, Chiang Mai, Thailand. Kegiatan diikuti oleh 40 orang peserta yang terdiri dari 18 orang *Liaison Officer* (1 *Liaison Officer*/ Negara) dan Staf ACMM sebanyak 22 Orang. Tujuan kegiatan tersebut adalah meningkatkan koordinasi militer medis regional ASEAN, mengembangkan Buku Pegangan *Military Liaison Officer ASEAN*, dan mengembangkan Rancangan Pertama Manual MERT ASEAN. Kegiatan ini membuahkan sejumlah hasil yaitu adanya

jaringan penghubung koordinasi diantara anggota militer medis ASEAN dan Negara-negara Plus, Rancangan Pertama Buku Pegangan *Military Liaison Officer ASEAN*, dan Rancangan Pertama Manual MERT ASEAN yang diserahkan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan.

Berdasarkan *Joint Declaration of The ASEAN Defence Ministers on Promoting Defence Cooperation for a Dynamic ASEAN Community* dinyatakan bahwa ACMM berpegang teguh pada komitmen penuh terhadap tujuan dan prinsip Piagam ASEAN yang melayani

kepentingan rakyat Negara Anggota ASEAN dan memastikan mereka hidup damai satu sama lain dan dunia pada umumnya sejalan dengan moto ASEAN “*One Vision, One Identity and One Caring and Sharing Community*”. Disadari bahwa pencapaian yang signifikan dan kemajuan pertahanan serta interaksi militer yang ada telah mengarah pada pembentukan berbagai mekanisme fundamental antara lain *ASEAN Military Ready Group (AMRG) on HADR* dan *ASEAN Center of Military Medicine (ACMM)*.

Penutup

Organisasi *ASEAN Center of Military Medicine (ACMM)* berada di bawah *ADMM (ASEAN Defence Minister Meeting)* yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama antara *Military Medical Services (MMS)* dari negara-negara anggota ASEAN. Oleh karena itu Indonesia harus berperan aktif terlibat, berinteraksi dan memperkuat kerja sama diantara negara-negara anggota ASEAN dan negara-negara Plus dalam mendukung integrasi regional dan pembangunan komunitas. Partisipasi dan peran Indonesia dalam mengikuti setiap kegiatan *ACMM* merupakan perwujudan diplomasi militer bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan kepercayaan Internasional dalam bidang kemanusiaan serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar negara anggota ASEAN melalui program pertukaran IPTEK bidang kesehatan.***

Daftar Pustaka

- *Annual Report ASEAN Center Of Military Medicine Tahun 2019*
- <https://www.antaraneews.com/berita/2548613/presiden-tandatangi-keppres-penetapan-keanggotaan-indonesia-di-acmm>
- Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia Pada Organisasi Internasional
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada *The ASEAN Center of Military Medicine*
- *Term Of Reference (TOR) of The ASEAN Center Of Military Medicine (ACMM)*
- *Concept Paper on Establishment of ASEAN Center Of Military Medicine (ACMM)*
- *Joint Declaration Of The ASEAN Defence Ministers On Promoting Defence Cooperation For A Dynamic ASEAN Community*



Dok Foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Kepala Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan (Kapusrehab Kemhan) Brigjen TNI dr. Nana Sarnadi, Sp.OG., M.M.R.S., memimpin Pembukaan Rehabilitasi Terpadu Return to Duty (RTD) Angkatan XLVII dan Rehabilitasi Medik Paripurna Return to Combat (RTC) Angkatan III, Penyandang Disabilitas Personel TNI dan PNS Kemhan Gelombang I TA.2022 untuk membekali berbagai keterampilan, di Lapangan Tenis Pusat Rehabilitasi (Pusrehab) Kemhan, Jakarta, Rabu (5/1), dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.***



Dok Foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto mewakili Menhan, secara simbolis menyerahkan protesa kepada atlet penyandang disabilitas Pusrehab Kemhan, yang berprestasi pada Pekan Paralimpik Nasional didampingi Kapusrehab Kemhan Brigjen TNI dr. Nana Sarnadi, Sp.OG., M.M.R.S., Kamis (13/1) di Kemhan, Jakarta. Saat penyerahan protesa kepada Pelda Aris Haryadi penyandang disabilitas kaki, Sekjen Kemhan juga mengucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih saat mengikuti Pekan Paralimpik Nasional XVI tahun 2021 di Papua, dan berharap dapat terus meningkatkan prestasi di masa mendatang.***



Dok Foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Wakil Menteri Pertahanan M Herindra mewakili Menteri Pertahanan menghadiri Rapat Kerja dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Senin (7/2) di kantor DPD RI, Senayan, Jakarta. Pada rapat tersebut, Komite I DPD RI dan Kemhan sepakat untuk menjali kerjasama dan kemitraan strategis dalam mewujudkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Rapat yang baru dilaksanakan pertama kalinya antara DPD RI dengan Kemhan tersebut dalam rangka mendapatkan prespektif yang utuh dari Kemhan khususnya terkait dengan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara.***



Dok Foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Irjen Kemhan) Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana memimpin pelaksanaan Pembekalan Penyegaran Auditor Itjen Kemhan selama dua hari, yang dimulai 5 sampai 6 Januari di Kemhan, Jakarta. Pembekalan kepada auditor yang mengundang narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dimaksudkan sebagai evaluasi kinerja auditor dalam pelaksanaan pengawasan internal. Dengan pembekalan ini diharapkan para auditor memiliki kesamaan pemahaman dan keseragaman langkah serta tindakan dalam pelaksanaan pengawasan internal.***



Dok Foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa Kementerian Pertahanan menaruh perhatian besar pada Akademi Militer TNI, baik dari sisi akademik maupun pembangunan atau perbaikan sarana. “Saya menaruh perhatian besar di lembaga pendidikan di lingkungan TNI ini. Tugas kalian belajar. Jangan sia-siakan usia muda kamu. Jaga dirimu baik-baik. Kalian dibutuhkan negara dan bangsa,” tegas Menhan Prabowo pada kunjungan kerja ke Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (5/2).***



Dok Foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan harapannya agar SMA Taruna Nusantara (TN), sebagai salah satu sekolah unggulan di Indonesia yang telah banyak mencetak putra dan putri terbaik bangsa, agar dapat setara dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. “Kami ingin menjadikan SMA Taruna Nusantara setara dengan sekolah terbaik dunia,” kata Menhan Prabowo saat mengunjungi SMA TN, di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (5/2).***



Dok Foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra melakukan kunjungan kerja ke PT. Dirgantara Indonesia (PTDI) di Bandung, Selasa (15/2) dan berkesempatan meninjau sejumlah fasilitas perusahaan, didampingi Direktur Utama PTDI Gita Amperiawan. Adapun maksud dari kunjungan kerja Wamenhan, sebagai tindak lanjut dari arahan Menhan Prabowo Subianto kepada PT. Dirgantara Indonesia, untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas serta kemampuannya, guna mengembalikan kejayaan industri dirgantara nasional.***



Dok Foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto memimpin Upacara Pelantikan, Pengangkatan Sumpah dan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Biro Humas Setjen Kemhan dari Marsma TNI Penny Radjendra kepada Kolonel Infanteri (Inf) Taufiq Shobri. Sertijab dilaksanakan secara sederhana dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan di tengah masih meningkatnya Pandemi Covid-19, Senin (14/2) di Ruang Kerja Sekjen Kemhan, Jakarta. Sebelum menjabat sebagai Karo Humas Setjen Kemhan, Kolonel Inf. Taufiq Shobri mengemban tugas sebagai Kepala Staf Korem (Kasrem) 174/Anim Ti Waninggap (ATW) Kodam XVII / Cendrawasih. Sedangkan Marsma TNI Penny Radjendra menempati jabatan baru sebagai Dosen Tetap Universitas Pertahanan (Unhan) RI.***

MENGENAL JET TEMPUR DASSAULT RAFALE



MENGENAL JET TEMPUR DASSAULT RAFALE



- Jet tempur generasi 4.5.
- Rentang sayap 10.90 m, Panjang 15.30 m dan Tinggi 5.30 m.
- Kecepatan maksimal 1.8 mach atau 750 knot.
- Ketinggian maksimum 50.000 kaki.
- Memiliki radar “Active Electronically Scanned Array” (AESA) RBE2.

● Rentang sayap 10.90 m, Panjang 15.30 m dan Tinggi 5.30 m.

● Kecepatan maksimal 1.8 mach atau 750 knot.

● Ketinggian maksimum 50.000 kaki.

● Memiliki radar “Active Electronically Scanned Array” (AESA) RBE2.

Sistem Persenjataan:

Rudal tempur dan pertahanan diri

Sistem Persenjataan:

- Rudal tempur dan pertahanan diri The MICA.
- Roket jarak jauh Meteor.
- HAMMER (*High Agile and Manoeuvrable Munition Extended Range*) seri senjata presisi berpemandu udara ke darat bertenaga roket dilengkapi dengan GPS dan inframerah.
- Rudal udara bertenaga *ram-jet*.
- Rudal jarak jauh SCALP.
- Rudal anti-kapal AM39 EXOCET.
- Bom berpemandu laser dengan hulu ledak mulai dari 500 pon hingga 2.000 pon.
- Meriam internal 2500 putaran/menit NEXTER 30M791 30 mm tersedia di tipe tempat duduk tunggal dan dua tempat duduk.





WIRA

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN



**Moving the National Capital to East Kalimantan
a Review from Defense and Security Aspects**

**Actualization of Integrated Health Information System
at the Ministry of Defense for National Defense**

**ASEAN Center of Military Medicine (ACMM) as a Forum for
Military Health Cooperation in Supporting National Defense**

EDITION I/2022



ENGLISH



www.kemhan.go.id



Kementerian Pertahanan
Republik Indonesia



[kemhanri](https://www.instagram.com/kemhanri)



[@Kemhan_RI](https://twitter.com/Kemhan_RI)



[Kemhan RI](https://www.youtube.com/KemhanRI)



Photo Source : void.id



Dear WIRA readers,

Praise is due to God Almighty, because with His permission, WIRA Magazine is able to greet the readers again through the First Edition in 2022. In this edition, the editors present a number of interesting and informative articles for WIRA readers.

We summarize and present information related to the activities of the Ministry of Defense leadership in the Leadership Focus rubric.

In the Article rubric, the editors present three articles with interesting topics, namely Moving the National Capital to East Kalimantan a Review from Defense and Security Aspects, Actualization of Integrated Health Information System at the Ministry of Defense for National Defense, and ASEAN Center of Military Medicine (ACMM) as a Forum for Military Health Cooperation in Supporting National Defense.

Meanwhile, in the Lens Focus rubric, the editors present photos of the activities of the Ministry of Defense leadership within the Ministry of Defense work units.

We do hope the information and articles presented in this edition of WIRA Magazine can add insight and knowledge as well as benefits for WIRA loyal readers wherever they reside and work.

To enrich WIRA magazine contents, we always welcome the participation of readers to submit articles, opinions, information, criticisms, and suggestions via email to redaksi.wira@kemhan.go.id. WIRA Magazine can also be accessed online at www.kemhan.go.id.

Happy reading

Head of Public Relations Bureau,

Brig. Gen TNI Taufiq Shobri, M. Han

EDITORIAL TEAM

Advisor: Secretary General of MoD/Air Marshal TNI Donny Ermawan T., M.D.S. - **Editor in Chief:** Head of Public Relation Bureau of the Sec.Gen of MoD/Brig. Gen TNI Taufiq Shobri, M.Han. - **Managing Editor:** Chief of Public Information and Library of Public Relation Bureau of The Sec. Gen of MoD/ Col. Dr. Sulistyanto, S.Pd., M.Comm. - **Editors:** M. Adi Wibowo, M.Si. - **Graphic Designer:** Imam Rosyadi. - **Photo:** Photographers of Public Relations Bureau. - **Distribution Staff:** Mandiri Triadi/Captain Lindu Baliyanto,. - **Published by:** Public Relation Bureau of the Sec.Gen of MoD - Jl. Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta -Telp. 021-3829151, Fax. 3452457

Contents

Main Focus>>

The Ministry of Defense Holds the 2022 Leadership Meeting Forum

6



“Through the meeting this year, it is expected to increase cooperation, collaboration, coordination and synergy to ensure the implementation of the 2022 Fiscal Year Work Program well and effectively, as well as improve the function of internal control by overseeing every activity program planning, so that the Predicate of Fair Opinion without Exceptions (WTP) from the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (BPK RI) to the Ministry of Defense can be maintained.

Ministry Of Defense Organizational Unit Leaders Meeting: Secretary General of the Ministry of Defense Expects National Defense Policy to be a Solution to the Threat

10

Leadership Focus>>

Defense Minister Prabowo Accompanies President Jokowi in Meeting with Singaporean PM

12

Deputy Minister of Defense Opens Coordination Meeting for Policy Determinants, Users and Producers in the Defense and Security Sector

18

Visiting PT. DI, Defense Minister Prabowo Supports CN235 Aircraft Marketing to International Markets

13

Deputy Minister of Defense Herindra Observes the Construction of a Lighthouse on the Border of Indonesia and Malaysia and Singapore

19

Inaugurating the MRI Center of the RSPAD, Defense Minister Prabowo Affirms Support for the Improvement of the TNI's Three Dimensions of Health

14

Secretary General of the Ministry of Defense Opens National Conference on State Defense

20

Defense Minister Prabowo Visits UGM, UGM Students Show Off Defense Technology Innovation

15

Secretary General Expects Outcomes from Every Ministry of Defense Activities

21

Defense Minister Prabowo Receives a Visit from the French Minister of the Armed Forces

16

Article>>

Moving the National Capital to East Kalimantan a Review from Defense and Security Aspects (Writer : Colonel Navy (P) Dr. Sugeng Suryanto, S.AP., M.A.P)

22



Actualization of Integrated Health Information System at the Ministry of Defense for National Defense (Writer : drg. Pongki Sipahutar, Sp.KG)

30

ASEAN Center of Military Medicine (ACMM) as a Forum for Military Health Cooperation in Supporting National Defense (Writer : Antonius Tri Novianto, S.T., M.M)

37





THE MINISTRY OF DEFENSE HOLDS THE 2022 LEADERSHIP MEETING FORUM

The Ministry of Defense (Kemhan) again held the 2022 Leadership Meeting Forum (Rapim). The event, which started from 19 to 20 January at the Ministry of Defense, Jakarta, was held face-to-face with limited participants and via video conference with strict health protocols.

A number of officials attended the Ministry of Defense's meeting with the theme "Consolidating the Development of National Defense Forces", including the TNI Commander General TNI Andika Perkasa, Army Chief of Staff (Kasad) General TNI Dudung Abdurachman, Naval Staff Chief (Kasal) Admiral TNI Yudo Margono, Air Force Chief of Staff (Kasau) Marshal TNI Fadjr Prasetyo, Chief of the Indonesian National Police (Kapolri) General Police Listyo Sigit Prabowo and from the Coordinating Ministry for Political, Legal, and Security Affairs (Kemenkopolhukam) the Secretary, Major General TNI Mulyo Aji, MA, and the Deputy for National Defense Coordination Hilman Hadi.

On the first day, Wednesday (19/1), Deputy Minister of Defense (Wamenhan) M. Herindra had the opportunity to open the 2022 Ministry of Defense Leadership Meeting (Rapim). In his opening remarks, the Deputy Minister of Defense highlighted

the importance of collaboration in efforts to update the National Defense Policy. The Deputy Minister of Defense said that the Ministry of Defense continues to make efforts to update the country's defense policies that are right on target, so that Universal People's Defense and Security System (Sishankamrata) can be implemented properly and Indonesia's defense and security remain strong and advanced.

"Through the meeting this year, it is expected to increase cooperation, collaboration, coordination and synergy to ensure the implementation of the 2022 Fiscal Year Work Program well and effectively, as well as improve the function of internal control by overseeing every activity program planning, so that the Predicate of Fair Opinion without Exceptions (WTP) from the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (BPK RI) to the Ministry of Defense can be maintained," said the Deputy Minister of Defense M. Herindra.

Furthermore, the Deputy Minister of Defense explained, based on the 45 Constitution, the task of the Ministry of Defense (Kemhan) is to carry out affairs in the defense sector. National defense aims to maintain and protect the sovereignty of the state, the territorial integrity of the Unitary State of the

Republic of Indonesia (NKRI), and the safety of the entire nation from all forms of threats. Therefore, the implementation of national defense must be guided by the Universal People’s Defense and Security System (Sishankamrata) which relies on all the strength of our resource components.

This is in line with the position of the Ministry of Defense as the only entry point for submitting all requirements for the implementation of the development of the state defense system, from the Organizational Unit of the Ministry of Defense or the TNI and exit points to Ministries and Institutions in the process of fulfillment.

After the opening remarks from the Deputy Minister of Defense, the Rapim participants listened to the explanation from the Inspector General of the Ministry of Defense Lt. Gen. TNI Ida Bagus Purwalaksana who facilitated the discussion on the Evaluation of the Ministry of Defense TA Program. 2021, which was followed by the presentation of the Director General of Defense Planning of Ministry of Defense Major General TNI Budi Priyono

who reviewed the Budget Allocation of the Ministry of Defense and the TNI for the 2022 Fiscal Year.

Meanwhile, on the second day of the Ministry of Defense Leadership Meeting on Thursday (20/1), Defense Minister Prabowo Subianto directly led the meeting. On this second day a number of 160 high-ranking TNI officers were also present, including TNI Commander General TNI Andika Perkasa, Kasad General TNI Dudung Abdurachman , Kasal Admiral TNI Yudo Margono, Kasau Marshal TNI Fajar Prasetyo, Kapolri General Police Listyo Sigit Prabowo and officials from other Ministries/ Institutions.

When leading the meeting, the Minister of Defense revealed that the state defense policy in 2022 was the result of evaluation and follow-up of efforts to achieve the policy targets set in the 2021 state defense policy.

The ongoing policy targets will be continued, including policies for the formation of reserve components and structuring of supporting



Photo Source : Public Relation Bureau of the Sec.Gen of MoD



Photo Source : Public Relation Bureau of the Sec.Gen of MoD

components, policies for the development of the TNI posture, the realization of defense areas based on large islands, development of a decentralized logistics system and strengthening of defense in strategic straits. "Through the Ministry of Defense's Rapim, it is hoped that there will be even closer synergy and coordination for the smoothness and success of future tasks," said Defense Minister Prabowo.

Defense Minister Prabowo also said that the current complex dynamics of the strategic environment has the potential to create various forms of threats such as military, non-military to hybrid threats which are predicted to still threaten national interests, endanger state sovereignty, territorial integrity, and the safety of the entire Indonesian nation in the future. "Military threats can take the form of foreign or domestic military threats, such as open conflict, conventional war, separatism, and the threat of intelligence operations," explained the Minister of Defense.

Violations of land, sea and air border areas such as violations by armed foreign ships to violations of airspace by foreign aircraft are also mentioned by Defense Minister Prabowo as a threat that Indonesia needs to anticipate.

Meanwhile, National Police Chief General Listyo Sigit Prabowo, who was also present on the second day of the Ministry of Defense Rapim, said in his remarks that the National Police fully supports the policy of consolidating the national defense forces, especially the development of the state defense system which is being drafted and becomes the roadmap for the 2020-2045 national defense development by Ministry of Defense.

"It takes a very strong synergy and professionalism between the TNI and Polri, along with all components of the nation to always be ready so that we have the posture of a modern state defense system and the development of a formidable force in dealing with the nature of various threats, both from within and from outside," he stressed. Police chief.

Still on the second day of the Ministry of Defense Rapim, the event was continued by listening to the presentation about the 2022 State Defense Policy by the Director General of Defense Strategy Ministry of Defense Major General TNI Rodon Pedrason and followed by the presentation about Contingency Analysis in the Perspective of National Defense from the Kabainstrahan Kemhan Major General TNI Yudi Abrimantyo as well as presentation regarding the Draft State Defense Strategic Document by Vice Rector I of the Defense University Major General TNI Jonni Mahroza.

The series of events for the 2022 Ministry of Defense Rapim ended with the submission of strategic national defense documents from the Defense Minister Prabowo to the Head of the Organizational Unit. The submission of strategic national defense documents is expected to be a reference for the Ministry of Defense and the TNI

in dealing with threats posed by the dynamics of the development of the strategic environment.

In addition, Defense Minister Prabowo also handed over the Defense and Security Equipment (Alpalhankam) symbolically from the Ministry of Defense to TNI Headquarters and Forces Headquarters which were received by the TNI Commander, Kasad, Kasal, and Kasau.

At the end of the 2022 Ministry of Defense Rapim event, Defense Minister Prabowo also officially established and introduced the new Indonesian Ministry of Defense logo to replace the Ministry of Defense logo that had been used since 2005.***



Photo Source : Public Relation Bureau of the Sec.Gen of MoD

MINISTRY OF DEFENSE ORGANIZATIONAL UNIT LEADERS MEETING

SECRETARY GENERAL OF THE MINISTRY OF DEFENSE EXPECTS NATIONAL DEFENSE POLICY TO BE A SOLUTION TO THE THREAT



Photo Source : Public Relation Bureau of the Sec.Gen of MoD

The Ministry of Defense (Kemhan) as the ministry in charge of state defense affairs, must have a national defense policy and appropriate strategic steps, in an effort to implement national defense. For this reason, national defense policies must be capable of and be a solution in dealing with threats posed by the dynamics of the development of the strategic environment.

“Therefore, in the implementation of the implementation of national defense, it is necessary to have a strategy that is guided by the Universal People’s Defense and Security System (Sishankamrata), which relies on all the strength

of the component resources we have, in the implementation of national defense,” said Secretary General of the Ministry of Defense Air Marshal TNI Donny Ermawan Taufanto at the opening of the 2022 Ministry of Defense Organizational Unit Leaders Meeting (Rapim UO Kemhan), at the Ministry of Defense, Jakarta, Wednesday (16/2).

In addition, the Secretary General of the Ministry of Defense continued to convey his direction, communication, coordination and collaboration between the Working Units (Satker) and Sub-Work Units (Subsatker) of the Ministry of Defense, as well as all stakeholders also need to be developed. The estuary of all of this, of course, will have a



Photo Source : Public Relation Bureau of the Sec.Gen of MoD

positive impact on the success and achievement of the effectiveness and efficiency of implementing the tasks and functions of the work unit, with the theme “Consolidation of the Development of the National Defense Forces”, to increase cooperation, coordination and collaboration in efforts to develop the national defense force, in realizing formidable defense system.

The 2022 Ministry of Defense UO Rapim is a forum for delivering 2022 leadership policies, delivering attention to the 2021 Ministry of Defense UO Performance and the delivery of 2022 Ministry of Defense programs and budgets. In addition, the Ministry of Defense’s UO Rapim also listened to the presentation of material by the Inspector General of the Ministry of Defense Lt. Gen. TNI Ida Bagus Purwalaksana regarding Attention to the Performance of the Ministry of Defense’s UO in 2021, and Head of Financial Planning Bureau (Karoenku) Secretary General of the Ministry of Defense Brigadier General TNI Sukabi regarding the 2022 Program and Budget.

At the end of the event, the Secretary General of the Ministry of Defense presented awards to the three Working Units that won the 2021 Corruption Free Area (WBK) Predicate, namely the Public Relations Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Defense, the Directorate of Health, the Directorate General of Defense Force of the Ministry of Defense and the Language Center of the Ministry of Defense’s Education and Training Agency.

Also present at the 2022 Ministry of Defense UO Rapim which was held virtually and face-to-face, Echelon I and II officials of the Ministry of Defense, Vice Rector I of the Defense University, Chair of the Standardization Research and Development Division of the Defense Industrial Policy Committee (KKIP) and Head of the Center for Strategic Logistics Reserves (PCLS) and representatives from Headquarters TNI and Armed Forces while still adhering to health protocols.***

DEFENSE MINISTER PRABOWO ACCOMPANIES PRESIDENT JOKOWI IN MEETING WITH SINGAPOREAN PM



Photo Source : *Bureau of Press Media and Information of the Presidential Secretariat*

Minister of Defense of the Republic of Indonesia Prabowo Subianto accompanied Indonesian President Joko Widodo in the Indonesia-Singapore Leaders' Retreat with Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong in Bintan Regency, Riau Islands Province, Tuesday (25/1).

During the meeting, several memorandums of understanding in the fields of politics, law and security and defense were agreed to improve the nation's sovereignty, namely an extradition treaty to prevent and eradicate cross-border criminal acts such as corruption, narcotics and terrorism, approval of the takeover of the Air Space Service or Flight Information Region (FIR) from Singapore to Indonesia which has been pursued since the 1990s, and a memorandum of understanding on the commitment to implement defense cooperation agreements between the two countries.

On the occasion of the meeting, Indonesian President Joko Widodo was also accompanied by Minister of Foreign Affairs Retno Marsudi, Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment Luhut Binsar Pandjaitan, Coordinating Minister for Economic Affairs Airlangga Hartarto, Cabinet Secretary Pramono Anung, Minister of Transportation Budi Karya Sumadi, and Minister of Law and Human Rights. Yasonna Laoly

Meanwhile, the Singapore delegation was attended by Senior Minister and Coordinating Minister for National Security Teo Chee Hean, Minister of Defense Ng Eng Hen, Minister of Foreign Affairs Vivian Balakrishnan, Minister of Home Affairs and Minister of Law K. Shanmugam, Minister of Transport S. Iswaran, and Minister of Manpower, and Second Minister of Trade and Industry Tan See Leng.***

VISITING PT DI, DEFENSE MINISTER PRABOWO SUPPORTS CN235 AIRCRAFT MARKETING TO INTERNATIONAL MARKETS



Photo Source : Bureau of Press Media and Information of the Presidential Secretariat

Minister of Defense of the Republic of Indonesia Prabowo Subianto during a working visit to PT. Dirgantara Indonesia (Persero), Wednesday (2/2) expressed the government's full support for PT. DI to expand the marketing of PT. DI products, especially CN235 to international markets. This was stated when witnessing the signing of the MoU on the cooperation in the sale and development of the CN235 aircraft between PT. DI and Jet Investment Group SARL, at the Hanggar Fixed Wing Final Assembly Line, PT. DI, Bandung. "I fully support cooperation in marketing PT. DI products, especially CN235 to the international market," said Defense Minister Prabowo.

Defense Minister Prabowo disclosed that other countries have expressed interest in the CN235 aircraft, such as Africa, the Middle East, Latin America, and several Asian and European countries. Therefore, this momentum must be utilized as well as possible by PT. DI. Defense Minister Prabowo also said that the Indonesian government had planned to purchase 10 CN235 aircraft produced by PT. DI, which are multirole aircraft. Therefore, Defense Minister Prabowo hopes that PT. DI can increase its production

capacity from the current four CN235 aircraft per year so that it can increase to 24 units in the next three years periodically to meet domestic and foreign demand.

As for increasing the capacity of the domestic defense industry, the Ministry of Defense always supports by maximizing Transfer of Technology (ToT) agreements and offsets from other countries. He had to help develop PT. DI. He has to invest here," said Defense Minister Prabowo. The signing of the MoU between PT. DI and Jet Investment Group SARL was carried out by the President Director of PT. DI Air Vice Marshal TNI Gita Amperiawan and CEO of Jet Investment Group SARL Yves-Michel Deloche, witnessed by the entire board of directors and commissioners of PT. DI.

Defense Minister Prabowo said that this collaboration is expected to be the first step to expand the marketing of PT. DI's products, especially CN235 to the international market. "We want to restore PT. DI to the level it has ever achieved and to become the pride of the nation as proof of Indonesia's rise," said Defense Minister Prabowo.

To the directors of PT.DI, Minister of Defense Prabowo also advised to always carry out management as well as possible. “If our industry is not strong, it is impossible for our economy to be strong. And if our economy is not strong, it is impossible for us to maintain the sovereignty of the Indonesian nation,” said Defense Minister Prabowo.

The President Director of PT. DI on that occasion said that PT. DI wanted to expand the

CN235 aircraft sales market internationally. The basic configuration of the CN235 aircraft in the future will use a renewable mission and avionics system as installed on the N70 TNI AL aircraft. “In this case, PT. DI and the Jet Investment Group will also develop the CN235 aircraft with Fire Fighting and Medical Evacuation configurations, along with strengthening services. after-sales,” said the President Director of PTDI.***

INAUGURATING THE MRI CENTER OF THE RSPAD, DEFENSE MINISTER PRABOWO AFFIRMS SUPPORT FOR THE IMPROVEMENT OF THE TNI’S THREE DIMENSIONS OF HEALTH

The Minister of Defense of the Republic of Indonesia, Prabowo Subianto, on Thursday (3/2) emphasized the support of the Ministry of Defense for increasing the ability of the TNI’s three-dimensional health sector. This was conveyed by Defense Minister Prabowo when he inaugurated a new health facility at the Gatot Subroto Army Central Hospital (RSPAD), namely the Magnetic Resonance Imaging (MRI) Center.

Defense Minister Prabowo said the government’s support for increasing the capacity of the TNI’s three-dimensional health sector, among others, is to add hospitals in the main commands and improve facilities at existing TNI hospitals to support the provision of the best health services for TNI soldiers and the general public. “In the coming wars, the great threat to our country will take more and more forms, including biological threats. Therefore, the arrival of the current pandemic is an alarm for us so that we can focus more and pay more attention to medical problems,” said Defense Minister Prabowo.

He continued that even for soldiers, the ability in the health sector is a very important support. “The health service, public health office is a very vital support for the success of an army. The existence of reliable health services is a morale for soldiers on all lines. Both land, sea and air.”

Minister of Defense Prabowo on the occasion also appreciated the health workers who have been fighting at the forefront in dealing with the COVID-19 pandemic, and appealed to all personnel at the hospital to always maintain and care for existing facilities. “Of course I remind you this is the people’s money, people’s money. We have to take good care of it. Take care of these great assets,” said Defense Minister Prabowo.

The head of the Army Central Hospital (RSPAD), Lt. Gen. TNI, dr. A. Budi Sulistya, Sp.THT-KL., M.A.R.S., on the occasion explained that the existence of this MRI Center will further complement and improve services at Gatot Subroto Army Hospital. Currently, RSPAD is the hospital that has the most MRIs in Southeast Asia with a total of five MRI units. “This is a matter of pride for the Indonesian people, for the TNI, and for the Army,” he said. Accompanying the Minister of Defense at this inauguration was the Head of TNI health Center (Kapuskes) TNI representing the TNI Commander and the Deputy Chief of Staff representing the Kasad.***

DEFENSE MINISTER PRABOWO VISITS UGM, UGM STUDENTS SHOW OFF DEFENSE TECHNOLOGY INNOVATION



Photo Source : Public Relation Bureau of the Sec.Gen of MoD

During the visit of the Minister of Defense of the Republic of Indonesia Prabowo Subianto to Gadjah Mada University (UGM) on Friday (4/2), the UGM academic community displayed several technological development innovations in the agricultural sector that had been successfully made. Several innovations in the defense sector displayed by UGM include the Fiachra Aeromapper UAV, Gama V2 Amphibious UAV, Pasopati Rocket Assisted Take-Off Missile, Palapa S-1 Drone, and Geospatial Artificial Intelligence (GEOAI) for the defense and security sector. security.

Azhar Aulia Rasidin (22), UGM Mechanical Engineering student class of 2017 who helped develop the Palapa S-1 Drone, said that the drone was used for surveillance. The drone, which has a cruising range of about 500 kilometers in six hours and can reach a height of 1 kilometer, has been developed since 2021 by the UGM Force Team. "This is for monitoring areas, such as forest fires. The most prominent advantage of this drone is the ability to take off directly vertically. So we can immediately reach the height we want to continue to move forward. Straight from there," said Azhar. "For defense, it might be in the border area, to monitor the border area, if for example there is something suspicious, it can be reported immediately,"

he continued.

Meanwhile, Ditya Farhaz (21) student of the Faculty of Mechanical Engineering UGM class of 2019 who helped develop the Pasopati Missile said that this missile is capable of targeting low targets and not being detected by radar. Ditya. He explained that this missile has been researched by UGM students since 2016-2017 with the result that it can fly a distance of about 5 kilometers with a maximum speed of 130 kilometers per hour with an altitude of 100 meters.

On this occasion, Defense Minister Prabowo appreciated the defense technology innovation from UGM. For this reason, a collaboration between the Ministry of Defense and UGM has been signed on the implementation of educational, research and technology activities that support national defense. "The Ministry of Defense will work closely with UGM. Same with our cooperation with other universities. We really need the results of research, the results of the work of our scientists. Our scientists are very decisive in developing technology for the Indonesian people," said Defense Minister Prabowo.

"That's why I came to campus and talked to the professors to find out where we could work together. Where can we help and synergize the capabilities that exist on campuses. We help and we encourage them so that they are more productive and innovative," he continued.***

DEFENSE MINISTER PRABOWO RECEIVES A VISIT FROM THE FRENCH MINISTER OF THE ARMED FORCES



Photo Source : Public Relation Bureau of the Sec.Gen of MoD

Indonesian Minister of Defense Prabowo Subianto received an honorary visit from the Minister of the Armed Forces of the French Republic H.E. Mrs. Florence Parly and her delegation at the Ministry of Defense, Jakarta, Thursday (10/2). In addition to meeting the Indonesian Minister of Defense, the Minister of the Armed Forces of the Republic of France also paid a courtesy call to the President of the Republic of Indonesia Joko Widodo and the Indonesian Minister of Foreign Affairs Retno Marsudi.

In a bilateral meeting at the Ministry of Defense, the two delegations discussed increasing defense cooperation between the two countries, which is expected to strengthen bilateral defense relations between Indonesia and France in the future. “We discussed several things in depth, as it is known that Indonesia and France have established defense cooperation for quite a long time since 1950. And currently, the status of our bilateral relations in the defense sector is at the highest status, namely we have signed the Defense Cooperation Agreement (DCA) on June 28, 2021. Of course, this requires ratification

from our parliament to be carried out properly,” said Defense Minister Prabowo.

The Indonesian Ministry of Defense welcomes the plan to develop a 2+2 cooperation mechanism between the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Defense of the two countries to increase bilateral cooperation. Indonesia and France have established strong defense cooperation, especially in the field of defense equipment. Defense cooperation in the field of education and training includes exchange visit program activities and planned visit of Indonesian marines to New Caledonia. In addition, more than 300 Indonesian military personnel have completed education and training programs in France. The educational program implemented in France in 2021 is education at the Army Staff Collage level and the Navy Specialty School.

The bilateral meeting between the Indonesian Ministry of Defense and the Delegation of the Minister of the Armed Forces of the French Republic ended with the signing of several cooperation agreements witnessed by the Ministers of Defense



Photo Source : Public Relation Bureau of the Sec.Gen of MoD

of the two countries. The cooperation agreements include: a contract to purchase 6 Rafale fighter aircraft between the Ministry of Defense Kabararahan and Dassault Aviation, as the beginning of a larger contract for the next 36 Rafale fighter aircraft, an MoU of cooperation in the field of research and development of submarines between PT. PAL with Naval Group, MoU on Offset and ToT Program cooperation between Dassault Aviation and PT. DI, MoU on cooperation in telecommunications between PT. Len Industri and Thales Group, and cooperation in the manufacture of large-caliber munitions between PT. Pindad and Nexter Munition.

Meanwhile the French Minister of the Armed Forces H.E. Mrs. Florence Parly said her visit was an opportunity to talk with Defense Minister Prabowo Subianto about various defense systems programs that Indonesia wants to develop with the support of France and the French Defense Industry whose professionalism and quality are recognized worldwide. France is determined to actively support Indonesia's major strategic programs and support the development of a solid Indonesian defense industry. "Indonesia's choice to use the Rafale aircraft shows Indonesia's trust in France and is proof that the strategic partnership between the two countries is very strong and dynamic. The signing of the contract between Indonesia and France which has just been carried out

is an important stage in the procurement process for Indonesian defense equipment, and France hopes that this cooperation contract can be activated as soon as possible," said Minister Parly.

On this honorary visit, the Minister of the Armed Forces of the French Republic was accompanied by the French Ambassador to Indonesia Mr. Olivier Chambard, the Head of the French Military Cabinet Mr. Fabian Mandon, Head of Sub-Directorate for International Relations Operations, Mr. Arnaud Gaviard, Diplomatic Counselor Mr Florian Escudie, Counselor for Industrial Cooperation Mr. Simon Desindes. Meanwhile, Defense Minister Prabowo was accompanied by the Deputy Minister of Defense of the Republic of Indonesia M. Herindra, Secretary General of the Ministry of Defense Air Marshal TNI Donny Ermawan Taufanto, Inspector General of the Ministry of Defense Lt. Gen. TNI Ida Bagus Purwalaksana, Chancellor of Indonesia Defense University (*Unhan*) Vice Admiral TNI Oktavian Amarula, Special Assistant to the Minister of Defense in the Field of Management Lt. Gen. (Ret.) Sjafrie Syamsudin, Special Assistant Minister of Defense for Strategic Environment Lt. Gen. (Ret.) Hotma M. Pandjaitan, Director General of Defense Strategic Ministry of Defense Maj. Gen. TNI Rodon Pedrasan, and The Head of Defense Facilities Agency Ministry of Defense Air Vice Marshal TNI Yusuf Jauhari. ***

DEPUTY MINISTER OF DEFENSE OPENS COORDINATION MEETING FOR POLICY DETERMINANTS, USERS AND PRODUCERS IN THE DEFENSE AND SECURITY SECTOR



Photo Source : Public Relation Bureau of the Sec.Gen of MoD

The most important thing in the defense industry ecosystem (Indhan) is a good corporate governance. In addition, simplicity, transparency and accountability are principles that must be followed by every stakeholder. This was stated by Deputy Minister of Defense (*Wamenhan*) M. Herindra when opening the Coordination Meeting (*Rakor*) for Policy Determinants, Users and Manufacturers of Defense and Security Facilities (*Alpalhankam*) in Jakarta, Wednesday (12/1), with the theme “Optimizing Defense Industry Capabilities. In Supporting the Readiness of the TNI, Polri and Related Ministries and Institutions as well as Realizing the Independence of the Defense Industry in the Framework of Improving the National Economy Towards a Resilient Indonesia”.

“Five things that need attention in the development of the defense industry include creating a defense industry ecosystem, building independence and increasing competitiveness, creating smart solutions in various fields, carrying out global supply chain reforms and strengthening strategic cooperation, and changing the mindset from the beginning. focus on products to focus on the market first”, said the Deputy Minister of Defense.

After opening the Coordination Meeting which was held while still implementing health protocols, the Deputy Minister of Defense accompanied by the Secretary General of the Ministry of Defense Air Marshal TNI Donny Ermawan Taufanto together with a number of Ministry of Defense

officials, had the opportunity to review the domestic exhibition of 28 defense industries with 30 exhibition stands, including PT. Len Industri, PT. PAL Indonesia, PT. Indonesian Aerospace, PT. Dahana and PT. Pindad.

The Coordination Meeting for Policy Determinants, Users and Producers in the Defense and Security Sector, also presented a number of speakers including, Director General of Defense Potential of Ministry of Defense Major General TNI Dadang Hendrayudha who delivered material on “Indhan Ecosystems and Job Creation”; Deputy general Planning Assistance (*Waasrenum*) TNI, Air Commodore TNI Wayan Superman with the material “Fulfillment of the TNI Alutsista by the Defense Industry”; Head of the National Police’s Strategic Planning Policy Bureau (*Karo Jakstra Srena National Police*) Chief Brigadier General Pol. Kasmudi, S.I.K. concerning “Fulfillment of the National Police Almatsus by the Defense Industry”; and the Head of the Center for Increasing the Use of Domestic Production (*P3DN*) of the Ministry of Industry, Nila Kumalasari who delivered material on “Increasing the Use of Domestic Defense and Security Products to Improve the National Economy”.

In addition to the Ministry of Defense, 260 participants who took part in the Coordination Meeting consisted of a number of Ministries and Institutions, TNI, Polri, and Indhan, which was intended to promote the product of Indonesian Defense and Security in the country to users and to build an ecosystem and friendly relationship between stakeholders, which aims to achieve independence in Indonesia. in the fulfillment of defense and security equipment (*Alpahankam*).***

DEPUTY MINISTER OF DEFENSE HERINDRA OBSERVES THE CONSTRUCTION OF A LIGHTHOUSE ON THE BORDER OF INDONESIA, MALAYSIA AND SINGAPORE



Photo Source : Public Relation Bureau of the Sec.Gen of MoD

Deputy Minister of Defense M. Herindra on Thursday (13/1) reviewed the construction of a lighthouse with a permanent structure and a helipad at Karang Singa in the northern waters of Bintan Island, Riau Archipelago Province, Batam, which is Indonesia's border area with Malaysia and Singapore.

The construction of the lighthouse and helipad was carried out by the Ministry of Defense and will be continued by the Ministry of Transportation. The existence of a lighthouse with a permanent structure is to be a marker point for Indonesian sovereignty. "We don't want the incident of the dispute between Indonesia and Malaysia related to the struggle over the islands of Sipadan and Ligitan which Malaysia finally won at the International Court of Justice in 2002," said Deputy Minister of Defense Herindra.

Karang Singa Island is located in the Malacca Strait, one of the busiest sea traffic lanes in the world, so it must be guarded and marked that it is the territory of

the Republic of Indonesia. At this international border, the state of Singapore has controlled the territory of Batu Putih (Pedra Branca). Meanwhile, Malaysia has controlled the Middle Rock. "There can be no more an inch of land that can be taken by other countries, we have to show our sovereignty," said the Deputy Minister of Defense.

Also attending the working visit was the Minister of Home Affairs Tito Karnavian and the Head of the Indonesian National Security Agency, Vice Admiral TNI Aan Kurnia. On that occasion, Minister of Home Affairs Tito said the important point of building this lighthouse is to balance the infrastructure that has been built by the Malaysian government which has built permanent structures and helipads in the Middle Rock area. While on Coral Lion Island there are only small buoys. "The important point is not to be vacuous. In Malaysia they have built a permanent structure, while in our area there are only 'buoys'. It's not permanent yet," said the Deputy Minister of Defense.***

SECRETARY GENERAL OF THE MINISTRY OF DEFENSE OPENS NATIONAL CONFERENCE ON STATE DEFENSE

Secretary General of the Ministry (Secretary General Kemhan) Air Marshal TNI Donny Ermawan Taufanto opened the 2022 National Conference on State Defense with the theme “Optimizing the Role of Ministries and Institutions, TNI, Polri, Regional Government, and National Components in Standardizing the State Defense Awareness Development Program” at Jakarta, Tuesday (25/1).

The National Defense Conference held by the Directorate General of State Defense, Directorate General of Defense Potential Ministry of Defense, was attended by Professor of Political Science at the Indonesian Defense University Prof. Salim Haji Said, Ph.D., Representatives from National Development Planning Agency Officials, Ministry of Home Affairs, Ministry of Education and Culture Research and Technology, Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform, Ministry officials and RI Institutions, Ministry of Defense Officials, TNI Headquarters, Forces Headquarters, Police, and Directors of State-Owned Enterprises or Private Companies as well as Participants in the 2022 State Defense National Conference.

“The 2022 State Defense National Consultation activity is very important and strategic, in addition to being a gathering place between officials of Ministries and Institutions, Regional Governments, TNI and Polri, as well as a vehicle for building synergy in carrying out State Defense Awareness Development (PKBN),” said the Secretary General of the Ministry of Defense in his welcome.

In addition, State Defense is believed to be one of the strategies in the implementation of national defense, where all components of the nation



Photo Source : Public Relation Bureau of the Sec.Gen of MoD

unite, equate the vision and mission in an effort to maintain state sovereignty, territorial integrity and the safety of the nation and state. History has proven that the Indonesian state was formed by all components of the nation. This formation began with the sacrifices made decades ago with the Spirit of Defending the Country.

Furthermore, the Secretary General of the Ministry of Defense said that State Defense is not only the duty and obligation of the Ministry of Defense, TNI and Polri, but State Defense is the duty and obligation of Indonesian citizens as part of the nation's components.

The National Defense Conference, which was held for two days while still implementing health protocols, was also filled with material delivered by the Director General of Pothan Kemhan Major General TNI Dadang Hendrayudha about “PKBN in the Scope of Education, Settlement, and Work”. In addition, a number of speakers also delivered material from representatives of Ministries and Institutions including from Bappenas, Ministry of Home Affairs, Ministry of Education and Culture, Ministry of PAN RB, and Ministry of Education and Culture Research and Technology. The series of National Defense Conference events which were held online and offline, were also filled with “Defense of the State Coffee Online” by presenting several figures, including Professor of Political Science at the Indonesian Defense University Prof. Salim Haji Said, Ph.D., Film Actor Ario Bayu, and Influencer Cania Citta.***

SECRETARY GENERAL EXPECTS OUTCOMES FROM EVERY MINISTRY OF DEFENSE ACTIVITIES



Photo Source : Public Relation Bureau of the Sec.Gen of MoD

Performance achievements must be properly accounted for, through performance measurement and evaluation as well as disclosure of the results of the analysis of performance measurement. In addition, the Performance Agreement is one of the benchmarks for the success of the organization, as well as the basis for assessment in the performance accountability evaluation carried out by the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (*Kemen PAN RB*).

This was conveyed by the Secretary General of the Ministry of Defense Air Marshal TNI Donny Ermawan Taufanto when opening and listening to the delivery of 2021 Performance Achievements and the signing of the 2022 Performance Agreement (PK) for the Ministry of Defense Organizational Work Unit (*Satker UO Kemhan*), which was also attended by the Inspector General of the Ministry of Defense Lt. Gen. TNI Ida Bagus Purwalaksana and the Rector of the Indonesian Defense University Vice Admiral TNI Octavian Amarula at Urip Sumohardjo Building, Ministry of Defense, Jakarta, Monday (24/1).

In this activity, all Working Units conveyed the performance achievements that had been carried out during 2021 based on the program of activities and budget, which had been allocated to the Secretary

General of the Ministry of Defense. According to the Secretary General of the Ministry of Defense when leading the activity, the performance achievements of the *Satker* will be used as input for the *Satker* to further improve its performance, so that the Ministry of Defense can have clear goals and objectives and be outcome oriented (result oriented government). "Don't just focus on the output of each activity, but the outcome of each program," said the Secretary General of the Ministry of Defense.

After submitting the Performance Achievements of the Ministry of Defense Working Unit, the event was concluded with the signing of the 2022 Performance Agreement (PK) by Echelon I and Echelon II the Heads of working units to the Secretary General of the Ministry of Defense. "This is one of the stages in the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) which is contained in Presidential Regulation Number 29 of 2014 concerning Government Agency Performance Accountability System (SAKIP)," said the Secretary General of the Ministry of Defense. Submission of Performance Achievements in 2021 and Signing of Performance Agreements (PK) for 2022 Ministry of Defense Working Units with implementing health protocols, carried out offline and online, followed by Echelon I, II, and III officials of the Ministry of Defense.***

MOVING THE NATIONAL CAPITAL TO EAST KALIMANTAN A REVIEW FROM DEFENSE AND SECURITY ASPECTS

By: Colonel Navy (P) Dr. Sugeng Suryanto, S.AP., M.A.P

Head of Sub-Directorate of State Defense Development Policy, Directorate of Defense Strategy Policy, Directorate General of Defense Strategy Ministry of Defense RI

The capital city in a country plays a very vital and strategic role, so that from the defense and security aspect, the State Capital area is considered a Center of Gravity (CoG). According to Dr. Connie Rahakundini Bakrie in the Seminar on the Strategic Center of Gravity of the Indonesian National Armed Forces held by the Strategic Studies Center of the TNI Headquarters, CoG could be similar to the characteristic capabilities of a country. These capabilities consist of freedom of action, physical ability, and the will to fight. This characteristic capability is also related to several aspects, including critical capability in which CoG can function in a country.

Most countries have a multi functional National Capital, namely as a political

center and government center, a center for business and economic activities, as well as a center for all that characterizes the overall character and diversity of a country. The National Capital also reflects the unique character of a nation, such as the diversity of ethnic groups, religions, cultures, and political directions. In the perspective of international relations, the State Capital is also the main gate of a country where diplomatic representatives of other countries and international organizations are located, as well as being a miniature of a country.

Jakarta as the capital city of Indonesia is one of the many metropolitan cities in the world. The role that Jakarta has in the dynamics happening in Indonesia is very central. Apart from functioning as the center of government, Jakarta is also

the center of economy, business, politics, and culture in Indonesia. This is what makes Jakarta a magnet for migration and extraordinary urbanization from all corners of the archipelago, which makes Jakarta the most populous city in Indonesia, as well as causing systemic problems in other aspects such as environmental degradation, congestion, crime and criminal acts. Even the rampant corruption in the realm of government is also thought to be due to Jakarta's status as the center of the economy.

The geographical position of Jakarta, which is located in the western part of Indonesia, has resulted in development inequality which tends to the west. In the economic field, the eastern part of Indonesia is more lagging behind than the western part of Indonesia which then spreads to all development indicators, although from the point of view of the availability of natural resources, the eastern part of Indonesia holds greater potential.

There have been many discussions and debates regarding the plan to move the country's capital city to other regions. The proposed agenda for moving the country's capital city to East Kalimantan

is part of the 2008 Indonesia Vision 2033 (Business.com Jakarta, 2011) to change the paradigm of national development. So far, the old paradigm has left a number of major problems in the capital city of Jakarta and nationally. The proposal for moving the capital city by the Indonesian Vision 2033 Team is based more on the interests of the Indonesian nation in the future. Starting from the developments of the last thirty years, there are indications of the low quality of policies and implementation of strategic policies in the management of national development, the proposal of the 2033 Indonesia Vision Team departs from complex considerations by taking into account the underlying causes and the driving factors as a whole.

The plan to move the State Capital to East Kalimantan to become "The Best City on Earth" as a symbol of the nation's identity; modern and of international standard; smart green, beautiful, sustainable; effective and efficient governance; and encourage economic equity in the eastern region (Bappenas, 2019). This is of course in line with the government's policy according to the 3rd Nawacita "Building Indonesia from the periphery by strengthening regions and villages within the framework of a unitary

state”, and in line with national development policies that integrate the roles and functions of Ministries/Agencies and Local Governments. In particular, in the field of defense and security, the President of the Republic of Indonesia once said that: “I ask for the title of TNI troops to also pay attention to the change in our national development paradigm which is no longer Java-centrist, but Indonesia-centrist.” National, 2017). In the end, in 2019, the President of the Republic of Indonesia asked for support from the DPR and all Indonesian people to move the State Capital to Kalimantan. This implies that, the development of defense and security State security through the development and strengthening of the TNI outside Java is a necessity that must be immediately realized in promoting national development in the regions, especially in the new State Capital.

Strategic Environmental Analysis and Threat Prediction

In general, the dynamics of the development of the strategic environment at the global, regional and national levels contribute to building trends or trends in the security situation (Ministry of Defense Number 24 of 2015). Analysis of the dynamics of the development of the strategic environment as a driving factor that can determine trends or trends in the security situation can be used as the basis for predicting the existence of various threats, obstacles, as well as opportunities that will be faced. The development of a national defense posture that takes into account strengths, capabilities and titles always pays attention to the dynamics of the development of the strategic environment, so that it is hoped that it will always be able to adapt to changes and the intensity of threats in order to protect national interests. Several strategic issues that affect national defense and security and need to be considered include: the security of the

Indo-Pacific region; military modernization, arms race, and proliferation of weapons of mass destruction; terrorism and radicalism; intra and interstate conflicts; border issues and transnational crimes; information security and cyber defense; demographic issues; environmental issues as well as food, water and energy security; natural disasters; and pandemics (Ministry of Defense Number 24 of 2015).

Based on strategic analysis and identification of highly dynamic threat predictions, it is possible to combine various types of threats. Therefore, current and future threats can be classified into three types, namely military threats, both armed and unarmed, non-military threats, and hybrid threats. Judging from the source, these threats can come from within or outside the country, and are carried out by state and non-state actors, which are national, regional and international. The impacts include all aspects of social conditions which include ideology, politics, economy, socio-culture, defense and security.

More specifically, the prediction of threats that may occur at any time in the new State Capital area in East Kalimantan, is the emergence of threats triggered by problems in the land border area with Malaysia; maritime border issues with Malaysia and the Philippines; problems in the Indonesian Archipelago Sea Lane (ALKI-II) area; and internal conflicts between tribes, races and religions are still considered to be triggers for problems.

Relocation of the National Capital from the Review of Defense and Security Aspects

From the aspect of defense and security review, in formulating the design of state defense and security development associated with the plan to relocate the State Capital to East Kalimantan, the dynamics of the strategic



environment development must be considered with various possible threats posed, both actual and potential.

Geographically, East Kalimantan is located on the island of Borneo which is located in the middle of the Republic of Indonesia, on the west it is protected by the island of Sumatra, in the south it is protected by the island of Java, in the east it is protected by the island of Sulawesi and in the north it borders directly with Malaysia (Sarawak).

From the regional side, East Kalimantan is a stretch of lowland without active mountains and hills and is outside the ring of fire, so this area is relatively safe from the threat of natural disasters and is ideal for development development. With regional conditions like this, East Kalimantan is

quite ideal to serve as the new capital city of Indonesia.

The plan to relocate the State Capital to East Kalimantan, from a review of the aspects of state defense and security, needs to take into account the following matters:

- a. The relocation of the State Capital to East Kalimantan will affect the current level of defense and security forces and capabilities, both for troops and defense equipment.
- b. Geographically, regional spatial planning will affect the policy formulation of the layer of defense that has been formed, both the buffer defense field that is outside the EEZ boundary line and the air layer above it; the main defense field which starts from the EEZ sea boundary to the territorial sea along with the air layer above it; and the internal defense field located in the areas of resistance in the land strategic compartment area, including the archipelago waters and the air layer above it, covering the battle area, communication area, and the base area for defense and resistance.

- c. What also needs to be considered regarding the field of defense is the possibility of military attacks by other countries, especially countries directly bordering Indonesia. If the National Capital is located on the same land as the land borders between countries, the capital city of the country will be more at risk of military attacks from that country. This is because the attacking country has the ease of landing on the ground to mobilize its military power.

With these considerations, as the State Capital, the East Kalimantan region must meet the criteria for a state defense and security perimeter capable of maintaining state sovereignty, maintaining the territorial integrity of the Unitary Republic of Indonesia and the safety of the entire Indonesian nation. Besides that, it must also be able to minimize the vulnerability of a country and be able to provide assistance in solving regional and international problems and so on.

Development of Defense and Security in the National Capital

In accordance with RI Law Number 23 of 2014 concerning Regional Autonomy related to the authority of Regional Governments, including the Capital Province Government as an autonomous region, it is explained that absolute government affairs are under the authority of the Central Government, including: foreign policy, defense, security, justice, monetary and national fiscal, as well as religion. The authority of the Central Government is not delegated to the Regional Government (Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2014). Likewise, regarding the

defense and security sector, the Indonesian capital as a national strategic area must have clear and measurable defense and security indicators and can provide comfort impacts for all Indonesian people and the international community, including in the region.

The development of defense and security areas is directed at realizing an Indonesia-centric defense area by prioritizing development in border areas, conflict-prone areas, and the outermost small islands towards the achievement of Indonesia as an archipelago and maritime state that is independent, advanced, strong and based on national interests (Perpres No. 8 year 2021). The development is carried out in an integrated manner between the Government and the Regional Government in the spatial planning of the national/regional area with the spatial layout of the defense area to realize the space, tools, conditions (RAK) for the defense and security of a formidable state through realizing the spatial layout of the land, sea and air defense areas, as well as realizing the readiness of human resources, SDB/A and infrastructure (Ministry of Defense Number 487 of 2020).

The determination of a location for the State Capital must meet the criteria and parameters of a conducive state defense and security condition, especially with regard to the following matters:

- a. To minimize state vulnerability.
- b. Protect and maintain the sovereignty of the state, the territorial integrity of the Republic of Indonesia and the safety of the entire nation (safeguard the territorial).



Photo Source : Public Relation Bureau of the Sec.Gen of MoD

- c. Assist in solving regional and international problems (help to settle regional and international affairs).
- d. Flexibility of maneuver in response to threats.
- e. Consideration of defense and security infrastructure development.
- f. Availability of supporting facilities.

For this reason, the determination of a location for the State Capital must have a buffer zone which has the following criteria: The location of the State Capital whose

position must be protected and not in front or behind the territory of the State; The State Capital must have access by land, sea and air in the event of a contingency situation; and the State Capital must have access to good transportation and communication and facilitate the mobilization of personnel in an emergency.

In order to realize a formidable state defense and security in the area of the State Capital of East Kalimantan, the development of defense and security needs to meet the standards of strength and capability of defense and security in the National Capital,

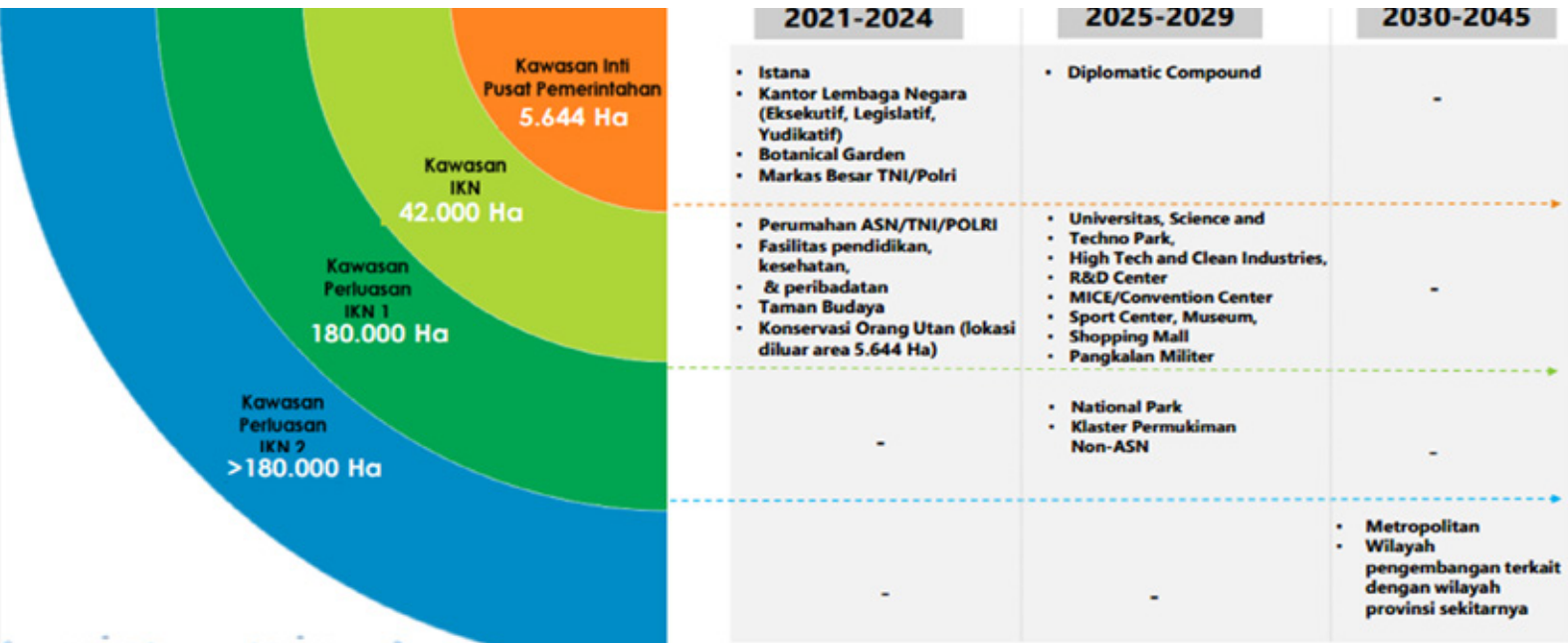


Photo Source : Kementerian PPN/Bappenas, 2019

through improving and strengthening the Posture of the TNI, both TNI AD, TNI AL and TNI AU is integrated and has inter-operability in Network Centric Warfare (NCW) through:

- a. Development of TNI unit strength, which includes: organization (formation of new units, relocation, validation); personnel; material; and facilities
- b. Development of the capabilities of TNI units which include: intelligence capabilities, defense and security capabilities, diplomacy capabilities, defense area empowerment capabilities, and support capabilities.
- c. Deployment of TNI Units, adjusted to the geography of the region and the needs of the dimensions.
- d. Grand design zoning and development phasing plans:

From the description above regarding the plan to move the State Capital to East

Kalimantan from a review of the defense and security aspects, it can be concluded that:

- a. From a review of the defense and security aspects, the transfer of the State Capital to East Kalimantan will affect the national defense posture, especially the TNI Unit and has the potential to reorganize the spatial layout of the defense area.
- b. The relocation of the State Capital to East Kalimantan has consequences for the need to reformulate the design of the TNI's strength and capability title in protecting the National Capital which is as the Center of Gravity (COG) Indonesia.
- c. Starting from the current condition of the State Capital City in Jakarta, the relocation of the State Capital to East Kalimantan needs to be focused on relocating the state government center only, so that the economic and business center remains in the city of Jakarta. ***



Photo Source : Public Relation Bureau of the Sec.Gen of MoD

Bibliography

- Adrianof, Chaniago. 2011 6 Reasons for moving the capital according to the Indonesian Vision Team 2033, Bisnis.com Jakarta
- Presentation material of the Ministry of National Development Planning/Bappenas in 2019
- Decree of the Minister of Defense Number: Kep/487/M/V/2020 concerning State Defense Policy in 2020, dated May 6, 2020 page 14
- Minister of Defense Regulation Number 24 of 2015 : National Defense Strategy 2015, page 7
- Presidential Regulation Number 8 of 2021 concerning General Policy on National Defense, points of general policy, p. 10 - 11.
- Limited Meeting related to the Synchronization of the Arrangement of TNI Unit Titles with National Development on January 12, 2017
- Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2014 concerning Regional Autonomy, Article 10

ACTUALIZATION OF INTEGRATED HEALTH INFORMATION SYSTEM AT THE MINISTRY OF DEFENSE FOR NATIONAL DEFENSE

By: drg. Pongki Sipahutar, Sp.KG

Intermediate State Defense Analyst, Secretariat General of Ministry of Defense

The development of science and technology today requires us to implement computerized information system processing. Likewise with the health information system. Many facilities are provided although there are still shortcomings. The convenience provided is in the form of fast, precise and accurate information. With a computer-based information system facilitates communication and data-based policy making. In addition, the information system will provide the required data according to the application made so that the resulting information is also in accordance with what we want. The resulting information can be presented including location maps, strength of health resources, capacity of health resources, resilience of health resources, outbreaks (in the form of data on diseases causing the outbreaks), and data on disasters.

Resource MAP



Source : Center for Crisis Management of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia (<https://dokumen.tips/embed/v1/pembuatan-peta-geomedik.html>)

Geomedical Map Component

KOMPONEN PETA GEOMEDIK

1. **Resource map** (peta informasi sumber daya disuatu wilayah administratif - SDM- sarana-prasarana)
2. **Hazard map** (peta informasi jenis dan karakteristik hazard disuatu wilayah administratif)
3. **Risk map** (peta sama dgn hazard map yg menunjukkan kemungkinan akan terjadinya suatu hazard)
 - **Vulnerability map** (peta distribusi elemen masyarakat - demografi- kultur-ekonomi-infrastruktur- lingkungan- yg dapat mengalami kerusakan akibat hazard)
4. **Community and environmental map** (peta informasi tentang komunitas disuatu area geografis, kepadatan pdkt, institusi pelayanan utk masyarakat, jaringan transportasi dll)

Computer-based health information systems are very appropriate to be applied in the Ministry of Defense and the Indonesian National Armed Forces (TNI), because the need for health information by collecting, processing, analyzing data and presenting information must be precise, fast and accurate. If we keep using the current method, with Indonesia's vast and spread out area, it is difficult to get precise, fast and accurate information to the regions and from all regions.

In the General Policy of State Defense for 2020-2024, based on the development of the strategic environment, it is stated that one type of real threat is the non-military threat in the health sector. In the face of non-military threats in the health sector, a

strong non-military defense is needed. A strong non-military defense is formed comprehensively, one of which is by integrating the health information system into the national defense health information system. Therefore, there is a need for an integrated State defense health information system through the preparation of various policies, guidelines and implementation directions, so as to form a strong, effective and efficient national defense.

In the General Policy of National Defense for 2020-2024 it is also stated that Ministries/ Institutions are placed as the main element in non-military defense while the Ministry of Defense (Kemhan) is a supporting element. The Ministry of Defense in this case the Directorate of Health, the Directorate General of Defense Forces of the Ministry of Defense (Ditkes Ditjen Kuathan Kemhan) has two positions, namely as the main component in military defense and a supporting element in non-military defense.

Observing the events that have existed starting from extraordinary events / outbreaks / pandemics that have occurred in Indonesia or in the world, it can be seen that many difficulties have occurred from handling to completion. In addition to field technical problems in the form of treatment, care and post-treatment, problems related to information become a very important factor. For example, the problem is often misinformation in the field regarding the number, activities and steps in handling. Plus news from online media whose sources are unknown or the truth of the news. This condition deserves to be criticized by creating an integrated health information system that can provide accurate, precise, effective and efficient information. This integrated national defense health information system is a single system that is used as a trusted and controlled information center from one place. Sources of data obtained from the regions are processed to produce up-to-date valid information, and confidentiality is maintained

Integrated Defense Health Information System Concept

The Health Information System is a set of arrangements which include data, information, indicators, procedures, devices, technology, and human resources that are interrelated and managed in an integrated manner. Health information systems are useful for directing actions or decisions that are useful in supporting health development. Besides that, health information is always needed in making health programs ranging from situation analysis, prioritization, making alternative solutions, program development, implementation and monitoring to the evaluation process for the implementation of health programs (dr. Guardian Yoki Sanjaya, Pusdatin Bulletin of the Ministry of Health, 2016) . From the aspect of non-military defense in the health sector, health information must always be up-to-date to determine the strength of health.

In terms of reality, the existing National Health Information system is still not connected among all existing health stakeholders, still fragmented each institution. It is necessary to connect all health stakeholders for non-military defense, consisting of the Ministry of Health as the main element, other Ministries/Institutions as supporting elements. If necessary, the entire health industry and supporting industries in the health sector can also be integrated. When the State is in an emergency, all stakeholders must unite to overcome it. Although the opportunities are still there, the obstacles are also many from various aspects. Therefore, the health information system must be integrated for national defense.

In essence, building an integrated health information system is building a centralized information network system with all health components as stakeholders, in this case within the Ministry of Defense and TNI. Building an integrated health information network within

INTEGRATED STATE DEFENSE HEALTH INFORMATION SYSTEM

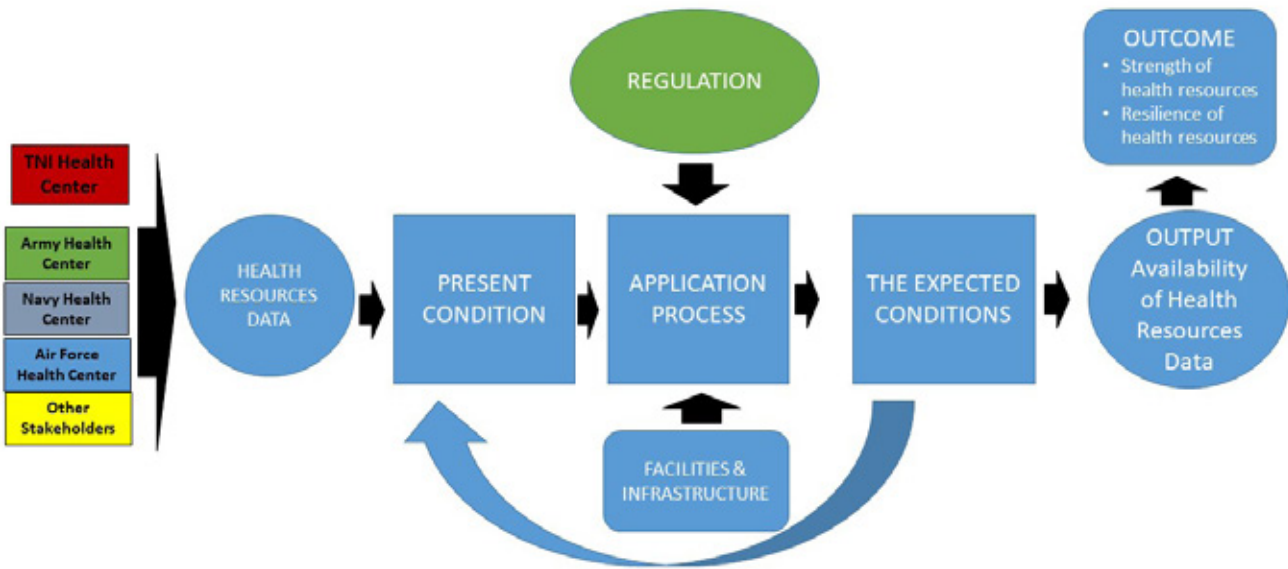


Photo Source : Writer

the Ministry of Defense and TNI is not easy. Planned and well-thought-out steps are needed so that the existing obstacles can be overcome. Based on the literature and experience in the field, a number of obstacles were found in the development of an integrated national defense health information system, including regulations, human resources, coordination, hardware and software, as well as monitoring and evaluation. Therefore, the development of an integrated defense health information system should be carried out through a regulatory approach, a human resource approach, a coordination approach, a software and hardware approach, as well as a monitoring and evaluation approach.

Regulatory Approach

In the regulatory aspect, it is necessary to formulate a regulation that regulates an integrated state defense health information system. The

need for a strong legal basis to build an integrated national defense health information system. All components in the health sector must be involved in building an integrated state defense health information system in the Ministry of Defense. This is also a form of commitment from all components involved in a national defense health information system. Regulations must specifically address the need for integration of the national defense health information system.

The policy-making is based on the premise that the making of regulations is to overcome a problem in the administration of state and social life, to create order and security, to renew people's behavior, and to direct or encourage the implementation of development (Guidelines for the Implementation of Regulatory Reform, 2011). Regulations should be formulated in a simple, clear, firm and consistent manner so that they are easy to understand and operate. Thus, the regulation of the

national defense health information system, which is integrated in the Directorate General of Defense Forces of the Ministry of Defense in the context of supporting national defense, is important and is the first step before creating an integrated national defense information system.

Health Sector Stakeholder Coordination Approach

In general, the national health information system is still fragmented, as is the health information system for national defense. Each generation has its own information system that is not yet integrated. When comprehensive information is needed, it takes quite a long time. This makes it difficult to coordinate the existing health forces in a short time. In addition, Indonesia's geographical conditions, especially in remote and border areas, will have an impact on the ability to coordinate health

information. Therefore, it is necessary to have the ability to perform data management starting from collecting, processing, and analyzing data as well as presenting and disseminating information both at the central and regional levels quickly, precisely and efficiently so as to produce valid and reliable health information.

In the aspect of coordinating an integrated health information system for national defense within the Ministry of Defense and TNI, ideally it is necessary to provide a Standard Operating Procedure (SOP), related to several things that must be coordinated, such as making clear indicators of various coordinated aspects, equating perception so as to facilitate coordination and create synergy, which involves all stakeholders in the health sector within the Ministry of Defense and TNI. Besides that, interconnection functions starting from data



Photo Source : Public Relation Bureau of the Sec.Gen of MoD

input, data verification, data processing and information provided also need to be presented.

Human Resources Approach

According to Abdurrahmat Fathoni (2006:8), human resources are the most important capital and wealth of every human activity, because humans are absolute elements to be analyzed and developed optimally. The problem is that the quantity and quality of human resources in Indonesia is still low. Whereas human resources play an important role in the successful implementation of the integrated information system health care for national defense. In connection with this, basically there are many methods that can be used to optimize and improve the performance of human resources, one of which can be done, namely through education and training in the field of information technology for managers of the national defense health information system. In addition, promotion in an organization is a must and is an effort to increase motivation and work

performance. The importance of promotion for someone is as a form of reward. On the other hand, a form of punishment can be given when an employee makes a mistake. It is hoped the rewards in the form of promotions and punishments can increase work productivity as well as provide a warning to an employee to keep doing good and right things.

Software and Hardware Approach

In an integrated health information system for national defense, software in the form of program applications and hardware in the form of computers are the main and very important components. Software and hardware are an inseparable unit. The development of software and hardware is currently very fast, so it is very necessary to make adjustments in the central and regional areas. On the other hand, the hardware used must be specifically for the integrated state defense system, and its use may not be used for other activities. However, at present there



Photo Source : Public Relation Bureau of the Sec.Gen of MoD

are limited hardware and software at various levels, making it difficult to integrate the health information system of the State defense. To address the existing conditions, there is a need for gradual hardware and software development according to the capabilities of the existing budget. In addition, various methods can actually be used in its development. Then at the next stage it is necessary to maintain and rejuvenate information systems both in the central and regional areas which are routine budgeting priorities.

Monitoring and Evaluation Approach

According to William N. Dun 2000, monitoring activities are intended to determine the suitability and accuracy of the activities carried out with the plans that have been prepared. Monitoring is also used to improve activities that deviate from the plan, correct abuse of rules and resources, and to strive for goals to be achieved as effectively and efficiently as possible. Program evaluation is one of the functions of program management, program evaluation is carried out on all or part of the elements program as well as on program implementation. Program evaluation must and can be carried out continuously, periodically, and or at any time. This evaluation activity can be carried out before, during, or after the program is implemented. Evaluation is an activity that intends to find out whether the predetermined goals can be achieved, whether the implementation of the program is in accordance with the plan, and or what impacts occur after the program is implemented (William N. Dunn 2000). Program evaluation is useful for decision makers to determine whether the program will be discontinued, improved, modified, expanded or improved. Monitoring and evaluation is carried out at every step that has been carried out starting from planning, implementing until the completion of activities for the development of an integrated state defense health information

system. Monitoring and evaluation is carried out on the steps of preparing regulations, increasing human resources, improving software and hardware and improving coordination between institutions.

Conclusion

A defense health information system which is built in an integrated and systematic manner is very important to know the strength of health and as a guide in making data-based policies. Meanwhile, the condition of the integration of health information systems within the Directorate General of Defense Forces of the Ministry of Defense will be able to realize the support of a strong national defense system in the health sector. From some of the discussions above, it can be concluded that the process of integrating information systems in the field of national defense health within the Directorate General of Defense of the Ministry of Defense will be achieved by carrying out the following steps, namely making regulations as the basis for the rule of law, building strong coordination of health information within the Ministry of Defense and TNI, carrying out education and training as well as promotion opportunities for employees, improving skills hardware and software, as well as monitoring and evaluation. Related to this, there are two suggestions which need to be submitted to relevant stakeholders in realizing an integrated health information system in order to support national defense. Firstly, the Ministry of Defense should integrate the National Defense Health Information System within the Ministry of Defense and TNI as early as possible which will become a role model in order to build a nationally integrated National Defense Health Information System to support non-military defense. Secondly, the Ministry of Defense should function as initiator by inviting the main elements of non-military defense in the creation of an integrated national defense health

information system.***

Bibliography

- Abdurrahmat, Fathoni. 2006. Human Resource Management. Rineka Cipta, Jakarta.
- Awi Muladi Wijaya MKM, 2017 Recent Developments and the future of Information Systems Health (SIK) in Indonesia, updated 11 october 2017
- Bappenas, 2011. Deputy for Politics, Law, Defense and Security Directorate for analysis of laws and regulations.
- Dunn, William N. 2000. Introduction to Public Policy Analysis. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- G.R.Terry and Rule, L.W.2003 "Fundamentals of management" Translation of Ticoula G.A. Earth Literature. Jakarta
- Handoko, Hani., 2009. Management, Edition II, BPFE and LMP2M-YKPN, Jakarta
- Harijanja, Marihot Tua Effendi. 2002. Human Resource Management, Publisher PT.
- Grasindo, Jakarta. Management, 7th Edition, volume 1, Ricky. W. Griffin, Erlangga Publisher. 2004
- Junaedi Ahmat Fadil SKM, MPH, and Barsasela Diana, SKM, ST, S.Kom, MKM, Health Information Technology I, Basic Computer Applications, Pusdik SDMKes Edition yr. 2018
- Sanjoyo Raden, Health Information System, FMIPA UGM, Aothor : Yuliani Kurnia <http://www.yoyoke.web.ugm.ac.id>
- Sumarsono, Sonny. 2003. Economics of Human Resource Management and Employment. Yogyakarta : Graha Ilm
- HEALTH INFORMATION SYSTEMS IN INDONESIA Posted on November 1, 2014 by realtimehealth
- Law No. 34 Year 2004 on TNI
- Law No. 23 Year 2019
- Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 8 of 2021 About the General Policy of National Defense for 2020-2024
- Minister of Defense Regulation No. 1 year 2021 regarding Jagara Hanneg th 2020-2024
- Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 97 of 2015 Regarding the Roadmap for Health Information Systems 2015-2019 (<http://www.pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdati/Lain-lain/PMK-No-97-Year-2015-About-Road-Map-Health-Information-Year-2015-2019.pdf>)
- Minister of Defense Regulation no. 24 of 2014 concerning the National Defense Health System
- Government Regulation Number 40 of 2006 concerning Procedures for the Preparation of the National Development Plan.

ASEAN CENTER OF MILITARY MEDICINE (ACMM) AS A FORUM FOR MILITARY HEALTH COOPERATION IN SUPPORTING NATIONAL DEFENSE

By: Antonius Tri Novianto, S.T., M.M.,

Intermediate State Defense Analyst, Secretariat General of Defense Power Ministry of Defense



Source: <https://thedi diplomat.com/2017/05/time-for-aseans-defense-ministers-meeting-to-put-traditional-security-on-the-agenda/>

Introduction

Law Number 37 of 1999 concerning Foreign Relations states that the implementation of Indonesia's foreign relations is based on the principles of equality, mutual respect, mutual benefit, and non-interference in each other's domestic affairs. This is an embodiment of the values contained in Pancasila and the 1945 Constitution. To achieve this goal, the Government of the Republic of Indonesia carries out foreign relations activities

with various countries and international organizations, both at the regional and global levels.

The implementation of foreign relations activities, both regionally and globally, is carried out through bilateral or multilateral forums and is dedicated to the national interest based on the principle of a free and active foreign policy. Presidential Regulation Number 30 of 2019 concerning Indonesia's Membership and Contribution to International Organizations mandates that Indonesia's membership and

contribution to international organizations is a manifestation of multilateral diplomacy and the implementation of a free and active foreign policy. Furthermore, Article 2 paragraph (2) of the Presidential Regulation states that Indonesia's membership and contribution is dedicated to the national interest as much as possible.

This basis becomes a reference for each Ministry and Institution so that international relations are intended to be able to provide the greatest benefit to the national interest. The qualitative benefits that can be obtained include international peace and security, and humanity. For example, the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia has established regional cooperation through ASEAN by being involved in the signing of the Joint Declaration of the ASEAN Defense Ministers on Promoting Defense Cooperation for a Dynamic ASEAN Community at the 10th ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM) in Vientiane, Laos, May 25, 2016. One of the contents of the joint declaration is the ASEAN Center of Military Medicine (ACMM).

History of the Establishment of the ASEAN Center of Military Medicine (ACMM)

ASEAN is a geo-political and economic organization of countries in the Southeast Asian region which was founded on August 8, 1967 in Bangkok, Thailand. This organization aims to promote social progress, economic growth, and cultural development of its member countries as well as to promote regional peace and security stability. ASEAN has 3 pillars of cooperation, namely politics and security, economy as well as social and culture.

The political and security pillar of ASEAN is a form of cooperation aimed at maintaining peace, security and stability in the region, including to promote shared values such as human

rights and democracy. One of the pillars of the cooperation is the ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM), a meeting of the ASEAN Defense Ministers in the region to increase transparency, openness and mutual trust among ASEAN member countries. ADMM is a cooperation platform among ASEAN Defense Ministers that aims to increase Confidence Building Measures (CBM) and maintain peace and security stability in the region through dialogue and practical cooperation.

The Ministry of Defense of the Kingdom of Thailand and the Russian Federation are the Co-Chairs of the ASEAN Defense Ministers Meeting - Plus Experts' Working Group on Military Medicine (ADMM-Plus EWG on Military Medicine) during the 2014-2016 period. The Co-Chairs have proposed a 3-Year Work Plan which was adopted by the ASEAN Senior Defense Officials Meeting-Plus (ADSOM-Plus) in Nay Pyi Taw, Myanmar in April 2014. In line with the adoption of the EWG 3-Year Work Plan on Military Medicine, the Co-Chairs worked on the establishment of the ASEAN Military Medicine Coordination Center (AMMCC) in Thailand in 2015. During the 5th ADMM-Plus EWG on Military Medicine Meeting / Senior Medical Planners' Workshop held in Pattaya City, Thailand in October 2014, discussed the appropriate structure and mechanism of the center relates to the initial concepts such as: mission, objectives as well as process management and administration of AMMCC. In addition, the Workshop agreed to change the name from AMMCC to the ASEAN Center of Military Medicine (ACMM).

The ACMM's mission is to create practical, effective and sustainable cooperation between military health services for ASEAN member countries and plus countries, both in normal and critical situations.

ACMM aims to develop joint medical response plans, assess medical needs in critical situations, conduct appropriate training/research courses in the field of emergency medical services and play a role in demonstrating regional solidarity by integrating capacities to respond to shared challenges. In order to achieve this goal, ACMM is expected to coordinate and cooperate with the military health services of ADMM-Plus countries, relevant agencies, and international organizations to support all areas of military medical cooperation, as follows:

- a. Capacity building and standardization of military health services;
- b. Harmonization of unique abilities;
- c. Enhanced ACMM capability to a world-class standard; and
- d. Sustainable development.

ACMM was established as a follow-up to the adoption of a concept paper on the establishment of the ACMM at the 9th ADMM in Langkawi, Malaysia in 2015. The aim is to strengthen and develop the establishment of practical, effective, and sustainable cooperation among Military Medical Services (MMS) from ASEAN Member States (AMS).

At the 10th ADMM in Vientiane, Lao People's Democratic Republic on May 25, 2016, the Defense Ministers of ASEAN member countries signed a Joint Declaration of The ASEAN Defense Ministers on Promoting Defense Cooperation for a Dynamic ASEAN Community which contains between others: adopting the ACMM Terms of Reference (TOR), which describes operational details and modalities for its implementation. Viewed from the formal

legal aspect, the joint declaration of ASEAN Defense Ministers is an official document that serves as a guideline for the ASEAN Defense community in implementing programs that have been planned and mutually agreed upon among ASEAN member countries. Thus, all the technical provisions that have been adopted in the text of the Joint Declaration become the legal basis that binds ADMM members, including the obligation to pay an annual fee to support the implementation of the Expert Working Group (EWG) Military Medicine in the ACMM Framework.

In accordance with its mandate and function, ACMM has facilitated, coordinated and collaborated between MMSAMS and Plus Countries, as well as worked in partnership with relevant institutions and international and regional organizations to support all areas of military medical collaboration. The forms of collaboration include: increasing regional Military Medical Service (MMS) capabilities by conducting joint workshops and training courses; periodically assess and use emergency and crisis medical information from MMS AMS and Plus Countries; aligning regional military medical capabilities for better interoperability and facilitating research technical, scientific and technical cooperation.

Basic Indonesian Membership Regulations at ACMM

In accordance with the Preamble to the 1945 Constitution, one of the objectives of the Government of the Unitary State of the Republic of Indonesia is to participate in implementing world order based on independence, eternal peace and social justice. To achieve this goal, the Government of the Republic of Indonesia has so far carried out foreign relations with various countries and regional and international organizations

“One Region, One Military Medical Teamwork”



HADR



Maritime Security



Military Medicine

“Good Medicine in Bad Place”



Peace-keeping Operations



Counter-Terrorism



Humanitarian Mine Action

Source : ACMM Annual report 2019

as well as carrying out foreign relations activities to serve the national interest based on the principle of an independent and active foreign policy.

Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 30 of 2019 concerning Indonesia’s Membership and Contribution to International Organizations states that Indonesia’s membership and contribution to international organizations is a manifestation of multilateral diplomacy and the implementation of a free and active foreign policy. In addition, Indonesia’s membership and contribution aims to increase the role and performance in international forums as well as improve relations between the Government of Indonesia and the governments of other countries and to increase the trust of the international community.

The government stipulates Presidential Decree of the Republic of Indonesia (Keppres) of Indonesia Number 19 of 2021 concerning Determination of Indonesian Membership at The ASEAN Center of Military Medicine on November 9, 2021. The issuance of this Presidential Decree further strengthens Indonesia’s presence in the organization and as a legal umbrella in carrying out all activities organized by the Republic of Indonesia. ACMM.

Follow-up of Indonesia’s Contribution Through ACMM

Reviewing from the aspect of the main tasks and functions of the work units within the Ministry of Defense, the ADMM cooperation activities in the Military Health sector can be carried out collaboratively between the

Directorate General of Defense Strategy of the Ministry of Defense and the Directorate General of Defense Power.

The Directorate General of Defense Strategy, in this case the Directorate Defense International Cooperation, as the leading sector with the authority in the field of international cooperation. Meanwhile, the Directorate General of Defense Power of the Ministry of Defense, in this case the Directorate of Health Directorate General of Defense Power of the Ministry of Defense as a supporter to provide human resources with military health qualifications, both from the Ministry of Defense and the TNI.

This is closely related to the activities carried out by ACMM as stated in the ACMM TOR, where the mandate and function of ACMM

is to facilitate coordination and cooperation between Military Medical Services (MMS) from the ASEAN Member State (AMS) and other countries (Plus Countries), and work in partnership with relevant institutions as well as international and regional organizations in order to support all areas of collaboration in the field of military health.

Indonesia's membership and contribution is also dedicated to the national interest. This can be seen from the activities that have been followed by Indonesia related to ACMM, namely:

- a. The First ASEAN Center of Military Medicine Board of Directors' Meeting which was held from 2 to 4 August 2016 in Bangkok, Thailand. It produced several work plans which include changing the



Source : <https://ipdefenseforum.com/2019/10/asean-doctors-share-data-expertise-to-boost-military-medical-capabilities/>



Source : ACMM Annual report 2019

name of ASEAN of Military Medical Coordination Center (AMMCC) to ASEAN Center Of Military Medicine (ACMM), preparation of “ASEAN Military Medical Handbook” which includes operating mechanism for AMMCC and SOPs (Standard Operation Procedure) for medical operations joint military from ADMM-Plus countries in support of Military Operations Other Than War (OMSP) and exchange of experience and expertise among MMS (Military Medical Service) members from ADMM-plus countries.

b. Multinational Medical Field Training Exercise (MEDEX) – 2019 which was held from 11 to 16 March 2019 in Lucknow, India and was attended by 10 representatives of countries who are members of the ACMM. The aim of the activity is to develop an integrated and synchronized regional response mechanism in medical emergency management during natural disasters and to establish standard operating procedures for medical response during crisis situations. The results of the activities include various roles of ACMM



Source : www.mindef.gov.sg

in the coordination process under SASOP among ASEAN and related institutions, studying and sharing common areas of military health field cooperation in responding to natural or man-made disasters that affect large numbers of civilians followed by epidemics and sharing concepts general best practices during disaster situations.

- c. Military-Medical Emergency Response Team (M-MERT) Exchange Training on 17 s.d. 21 June 2019 in Bangkok, Thailand. The materials that were followed included the ASEAN HADR Response Mechanism, Draft The Military-MERT, Presentation on the Draft Handbook of MERT Exchange Training by Col Jiraporn Chomsri, Thailand and FTX activities with the FTX scenario, namely an earthquake that caused mass casualties. Other activities include testing Mass Casualty Management, transporting victims from

the Disaster Area to a field hospital that has been established by M-MERT and evacuating victims who have undergone first aid to the hospital.

- d. The 2nd ACMM Liaison Officers' Meeting 2019 which was held from 15 to 20 July 2019 at Kantary Hill Hotel, Chiang Mai, Thailand. The activity was attended by 40 participants consisting of 18 Liaison Officers (1 Liaison Officer/State) and 22 ACMM Staff. The objectives of the activity were to improve ASEAN regional medical military coordination, develop the ASEAN Military Liaison Officer Handbook, and develop the First Draft of the ASEAN MERT Manual. This activity produced a number of results, namely the existence of a coordinating liaison network between ASEAN medical military members and Plus Countries, the First Draft of the ASEAN Military Liaison Officer Handbook, and the First Draft



Source : ACMM Annual report 2019

of the ASEAN MERT Manual which was submitted to the Board of Directors for approval.

Based on the Joint Declaration of The ASEAN Defense Ministers on Promoting Defense Cooperation for a Dynamic ASEAN Community, it is stated that ACMM is fully committed to the goals and principles of the ASEAN Charter which serves the interests of the people of ASEAN Member States and ensures

they live in peace with each other and the world at large which is in line with the ASEAN motto “One Vision, One Identity and One Caring and Sharing Community”. It is realized that significant achievements and progress in defense and existing military interactions have led to the establishment of various fundamental mechanisms, including the ASEAN Military Ready Group (AMRG) on HADR and the ASEAN Center of Military Medicine (ACMM).

Conclusion

The ASEAN Center of Military Medicine (ACMM) organization is under the ADMM (ASEAN Defense Minister Meeting) which facilitates coordination and cooperation between Military Medical Services (MMS) from ASEAN member countries. Therefore, Indonesia must play an active role in engaging, interacting and strengthening cooperation among ASEAN member countries and Plus countries in supporting regional integration and community development. Indonesia's participation and role in participating in every ACMM activity is a manifestation of military diplomacy in the health sector in order to increase international trust in the humanitarian field as well as to improve coordination and cooperation among ASEAN member countries through the science and technology exchange program in the health sector.***

Bibliography

- Law Number 37 of 1999 concerning Foreign Relations
- Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 30 of 2019 concerning Indonesia's Membership and Contribution to International Organizations
- Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 19 of 2021 concerning Stipulation of Indonesian Membershi
- Term Of Reference (TOR) of The ASEAN Center Of Military Medicine (ACMM)
- Concept Paper on Establishment of ASEAN Center Of Military Medicine (ACMM)
- Joint Declaration Of The ASEAN Defence Ministers On Promoting Defence Cooperation For A Dynamic ASEAN Community
- Annual Report ASEAN Center Of Military Medicine Year 2019
- <https://www.antaraneews.com/berita/2548613/ppresi-tandatangani-keppres-penetapan-kememberan-indonesia-di-acmm>



Photo Source : Public Relation Bureau of the Sec.Gen of MoD

Head of the Ministry of Defense's Rehabilitation Center (Kapusrehab Kemhan) Brigadier General TNI dr. Nana Sarnadi, Sp. OG., MMRS, led the Opening of Integrated Rehabilitation Return to Duty (RTD) Force XLVII and Medical Rehabilitation Plenary Return to Combat (RTC) Batch III, Persons with Disabilities TNI Personnel and Civil Servants of the Ministry of Defense Batch I FY2022 to equip various skills, at the Rehabilitation Center Tennis Court (Pusrehab) Kemhan, Jakarta, Wednesday (5/1), while still implementing health protocols.***



Photo Source : Public Relation Bureau of the Sec.Gen of MoD

Secretary General of the Ministry of Defense Air Marshal TNI Donny Ermawan Taufanto representing the Minister of Defense, symbolically handed over prosthesis to athletes with disabilities Pusrehab Kemhan, who excelled at National Paralympic Week accompanied by Head of the Ministry of Defense's Rehabilitation Center (Kapusrehab) Kemhan Brigadier General TNI dr. Nana Sarnadi, Sp. OG., M.M.R.S., Thursday (13/1) at the Ministry of Defense, Jakarta. During the presentation of the prosthesis to second sub-lieutenant Aris Haryadi with a foot disability, the Secretary General of the Ministry of Defense also congratulated him on the achievements he had made while participating in the XVI National Paralympic Week 2021 in Papua, and hoped to continue to improve his achievements in the future.**



Photo Source : Public Relation Bureau of the Sec.Gen of MoD

Deputy Minister of Defense M. Herindra representing the Minister of Defense attended a Working Meeting with Committee I of the Regional Representatives Council of the Republic of Indonesia (DPD RI), Monday (7/2) at the DPD RI office, Senayan, Jakarta. At the meeting, Committee I DPD RI and the Ministry of Defense agreed to establish strategic cooperation and partnerships in realizing the Universal People's Defense and Security System (Sishankamrata). The meeting which was held for the first time between the DPD RI and the Ministry of Defense was in order to get a complete perspective from the Ministry of Defense, especially related to the implementation of policies on the implementation of national defense.***



Photo Source : Public Relation Bureau of the Sec.Gen of MoD

Inspector General of the Ministry of Defense (Irjen Kemhan) Lt. Gen. TNI Ida Bagus Purwalaksana led the implementation of the Ministry of Defense's Inspection General Auditor Refresher for two days, starting from January 5 to 6 at the Ministry of Defense, Jakarta. Provision for auditors who invite sources from the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), as an evaluation of the auditor's performance in the implementation of internal control. With this debriefing, it is hoped that the auditors have a common understanding and uniformity of steps and actions in the implementation of internal control.***



Photo Source : Public Relation Bureau of the Sec.Gen of MoD

The Minister of Defense of the Republic of Indonesia Prabowo Subianto emphasized that the Ministry of Defense pays great attention to the TNI Military Academy, both in terms of academics and the construction or improvement of facilities. "I pay great attention to this educational institution within the TNI. Your job is to study. Don't waste your youth. Take care of yourself. You are needed by the state and the nation," said Defense Minister Prabowo on a working visit to the Military Academy (Aknil) in Magelang, Central Java, Saturday (5/2).***



Photo Source : Public Relation Bureau of the Sec.Gen of MoD

The Minister of Defense of the Republic of Indonesia Prabowo Subianto expressed his hope that SMA Taruna Nusantara (TN), as one of the leading schools in Indonesia which has produced many of the nation's best sons and daughters, can be on par with the best schools in the world. "We want to make Taruna Nusantara High School on par with the best schools in the world," said Defense Minister Prabowo while visiting TN High School, in Magelang, Central Java, Saturday (5/2).***



Photo Source : Public Relation Bureau of the Sec.Gen of MoD

Deputy Minister of Defense (Wamenhan) M. Herindra made a working visit to PT Dirgantara Indonesia (PT. DI) in Bandung, Tuesday (15/2) and had the opportunity to review a number of company facilities, accompanied by PT. DI President Director Gita Amperiawan. As for the purpose of the working visit of the Deputy Minister of Defense, as a follow-up to the direction of the Minister of Defense Prabowo Subianto to PT Dirgantara Indonesia, to increase and develop its capacity and capabilities, in order to restore the glory of the national aerospace industry.***



Photo Source : Public Relation Bureau of the Sec.Gen of MoD

Secretary General of the Ministry of Defense (Secretary General Kemhan) Air Marshal TNI Donny Ermawan Taufanto, led the Inauguration Ceremony, Oath of Appointment and Position Handover (Sertijab) Head of the Public Relations Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Defense from Air Commodore TNI Penny Radjendra to Colonel (Inf) Taufiq Shobri. The ceremony was carried out in a simple manner by applying the discipline of health protocols in the midst of the increasing Covid-19 pandemic in the Work Room of the Secretary General of the Ministry of Defense, Jakarta on Monday (14/2). Prior to serving as Karo of Public Relations of the Secretariat General of the Ministry of Defense, Colonel (Inf) Taufiq Shobri assumed the role of Chief of Staff of Military Region Command (Kasrem) 174/Anim Ti Waninggap (ATW) Kodam XVII / Cendrawasih. Meanwhile, Air Commander TNI Penny Radjendra occupies a new position as a Permanent Lecturer at the Indonesian Defense University.***